

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA

TRIWULAN IV TAHUN 2021





BADAN POM

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN IV TAHUN 2021

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan obat dan makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 dituangkan dalam “Kinerja BPOM Dalam Angka”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi premarket, hingga pengawasan post-market yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Hingga tahun 2021 pandemi COVID 19 masih melanda dunia. Hal tersebut benar - benar mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan dan kebiasaan kita. Tidak terkecuali juga dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021, beberapa kinerja yang telah dicapai Badan POM diantaranya adalah penerbitan 183.323 NIE, pemeriksaan di 35.366 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 73.610 sampel, 239 perkara, dan 48 kegiatan pelaksanaan KIE. Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.



Jakarta, 16 Maret 2022

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Penny K. Lukito'.

Dr. Penny K. Lukito, MCP

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
HIGHLIGHT	iv
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	5
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Produk Obat dan Makanan.....	5
II. Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.....	10
III. Standardisasi.....	10
IV. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan.....	13
V. Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan.....	13
VI. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat.....	16
VII. Digitalisasi Pelayanan Publik.....	23
VIII. Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.....	25
IX. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum).....	27
X. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	25
XI. Kerjasama Internasional.....	32
XII. Sumber Daya Manusia.....	33
XIII. Pengadaan Barang Jasa.....	35
XIV. Pengelolaan Anggaran.....	35
PENUTUP.....	35
LAMPIRAN.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Registrasi Obat dan Makanan	5
Gambar 2.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan.....	5
Gambar 3.	Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan.....	6
Gambar 4.	Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan.....	6
Gambar 5.	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted)	7
Gambar 6.	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)	7
Gambar 7.	Profil Sertifikasi Obat dan Makanan.....	8
Gambar 8.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan	8
Gambar 9.	Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan.....	9
Gambar 10.	Profil Profil Laporan Efek Samping	9
Gambar 11.	Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia Triwulan IV Tahun 2021	10
Gambar 12.	Grafik Baku Metode Analisis yang dikembangkan Triwulan IV Tahun 2021.....	14
Gambar 13.	Grafik Baku Pembanding yang dikembangkan Triwulan IV Tahun 2021.....	14
Gambar 14.	Grafik Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu.....	14
Gambar 15.	Grafik Peralatan Laboratorium yang Sudah Terkalibrasi Sesuai Standar.....	15
Gambar 16.	Grafik Pengujian Spesimen Covid.....	15
Gambar 17.	Grafik Penerbitan Siaran Pers.....	16
Gambar 18.	Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi Kepada Media.....	16
Gambar 19.	Profil Engagement Media Sosial Badan POM.....	17
Gambar 20.	Jumlah Pemberitaan tentang Badan POM selama Triwulan IV Tahun 2021.....	18
Gambar 21.	Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media.....	19
Gambar 22.	Profil Pengguna Layanan Informasi Badan POM Berdasarkan Profesi.....	20
Gambar 23.	Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Jenis Media.....	20
Gambar 24.	Profil Layanan Informasi yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi.....	21
Gambar 25.	Topik Layanan Infomasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM	21

Gambar 26.	Tampilan Dashboard Aplikasi INRASFF Pengembangan Tahun 2021.....	23
Gambar 27.	Portal Satu Data BPOM.....	24
Gambar 28.	Grafik Sebaran Jabatan Fungsional BPOM.....	33
Gambar 29.	Data/Informasi/Pengetahuan yang diunggah dalam aplikasi berdasarkan kategori/ Fungsi.....	34



BADAN POM

HIGHLIGHT

s.d. TRIWULAN IV TAHUN 2021



Bersamaan dengan kegiatan peluncuran Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO), Badan POM memberikan edukasi kepada para pelaku usaha mengenai penerapan sistem tersebut. Sebagaimana disampaikan Kepala Badan POM SMKPO merupakan sistem yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan. SMKPO merupakan pembaruan paradigma pengawasan, dari yang selama ini *watchdog control* (bergantung dari hasil pengawasan Badan POM), kini menjadi *proactive control*, yaitu pelaku usaha secara mandiri melaporkan hasil audit internalnya kepada Badan POM.

Konsisten Berikan Edukasi, Badan POM Kembali Gelar Webinar STOP Kosmetika Bermerkuri

Badan POM kembali menggelar kegiatan *Webinar Series*: STOP Kosmetik Bermerkuri yang mengusung tema “Jangan Salah Pilih Kosmetika, Katakan Tidak pada Merkuri!”. Kegiatan ini merupakan seri ketiga dari *Webinar Series Cosmetic Talkshow* (Cosmetalk) yang sebelumnya juga telah dilakukan dua kali pada tahun 2020 dan menjadi bagian dari Gelaran Aksi Nasional Penghapusan Merkuri dalam Kosmetik. Kepala Badan POM menyampaikan bahwa meningkatnya kebutuhan penggunaan kosmetika merupakan efek dari perubahan gaya hidup saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman, aspek kebutuhan tidak hanya berupa kebutuhan primer, tetapi juga kebutuhan sekunder atau penunjang.

Penggunaan kosmetika merupakan salah satu aspek penting yaitu sebagai kebutuhan penunjang penampilan yang prima agar tubuh terawat dengan baik. Meningkatnya kebutuhan ini terlihat dari data pendaftaran produk Obat dan Makanan di Badan POM. Sekitar 60% produk terdaftar di Badan POM adalah produk kosmetika.



Pekan Gelar Pendampingan UMK *Frozen Food* pada Masa Pandemi, Kiat Badan POM Dukung UMK Berdaya Saing



Badan POM menyelenggarakan Pekan Gelar Pendampingan Usaha Mikro Kecil (UMK) *Frozen Food* pada Masa Pandemi yang berlangsung selama lima hari, dari 2 hingga 5 November 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat serta pelaku UMK Pangan Olahan, khususnya *frozen food* dan *stakeholder* terkait pendampingan UMK mulai dari cara memperoleh permodalan, perizinan, produksi hingga pemasaran.

Kepala Badan POM menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan yang digelar selama sepekan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari penjelasan publik yang dirilis Badan POM tentang Ketentuan Perizinan Pangan Olahan yang Disimpan Beku. Juga sebagai bentuk komitmen Badan POM dalam melakukan pendampingan kepada UMK *frozen food*.

Utamakan Perlindungan Konsumen, Badan POM Raih Raksa Nugraha - ICPA 2021

Tahun 2021, Badan POM kembali meraih anugerah Raksa Nugraha – *Indonesian Consumer Protection Award* (ICPA) 2021 dengan peringkat “Platinum” dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Keberhasilan ini membuktikan komitmen Badan POM dalam penerapan perlindungan konsumen di tengah pandemi COVID-19. Setelah sebelumnya pada Tahun 2020, Badan POM juga meraih penghargaan yang sama.

Kepala Badan POM menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Badan POM akan terus berkomitmen memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan konsumen.



Sarasehan Jamu Nasional: Jejak Empiris dengan Dukungan IPTEK Menuju Kemandirian Produk Herbal Nasional



Sebagai langkah awal rangkaian napak tilas jejak empiris jamu nusantara dan dalam rangka mendukung pengembangan jamu nusantara, Badan POM menggelar kegiatan Sarasehan Jamu Nasional: Jejak Empiris dengan Dukungan IPTEK Menuju Kemandirian Produk Herbal Nasional secara *offline* dan *online*. Kegiatan ini termasuk menjadi upaya dalam mendorong percepatan peningkatan daya saing jamu produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kepala Badan POM menyebut potensi kekayaan alam Indonesia yang dikembangkan dalam bentuk produk herbal dapat menjadi *medical tourism* (wisata pengobatan) atau *wellness tourism* (wisata kebugaran). Pengembangan Produk Herbal berbahan alam Indonesia ke arah *medical* atau *wellness tourism* dapat mendukung pertumbuhan perekonomian dalam negeri karena dapat mengurangi ketergantungan bahan baku impor.

Jelang Nataru, Badan POM Intensifkan Pengawasan Pangan Olahan dan Fokus pada E-Commerce

Dalam rangka melindungi masyarakat, Badan POM secara rutin melakukan pengawasan ke berbagai sarana. Kepala Badan POM, dalam konferensi pers Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan Jelang Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, menjelaskan Badan POM akan semakin intensif melakukan pengawasan jelang perayaan hari besar seperti bulan Ramadan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Intensifikasi pengawasan pangan olahan jelang Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 pada periode 1 Desember 2021 – 7 Januari 2022 dilakukan dalam 5 tahap. Intensifikasi ini tiap tahapnya dievaluasi Badan POM dan dilaporkan hasilnya kepada masyarakat.

Kepala Badan POM menyebutkan intensifikasi pengawasan tahun 2021 difokuskan pada beberapa target yaitu produk tanpa izin edar, kedaluwarsa, atau rusak di sarana peredaran termasuk sarana importir, sarana penjualan, sarana ritel, dan gudang distributor. Beliau juga menambahkan intensifikasi ini juga terkait penjualan melalui *e-commerce* yang semakin marak di masa pandemi dengan fokus pengawasan pada gudang-gudang penyimpanan/pendistribusian produk yang diperjualbelikan di *e-commerce*.





BADAN POM

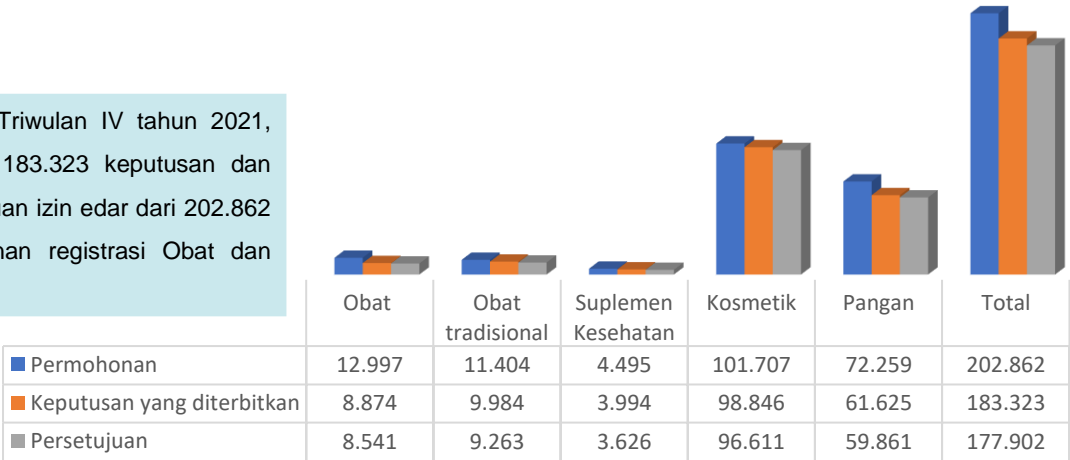
**HASIL KEGIATAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN
s.d. TRIWULAN IV TAHUN 2021**

I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan

Pengawasan pre-market

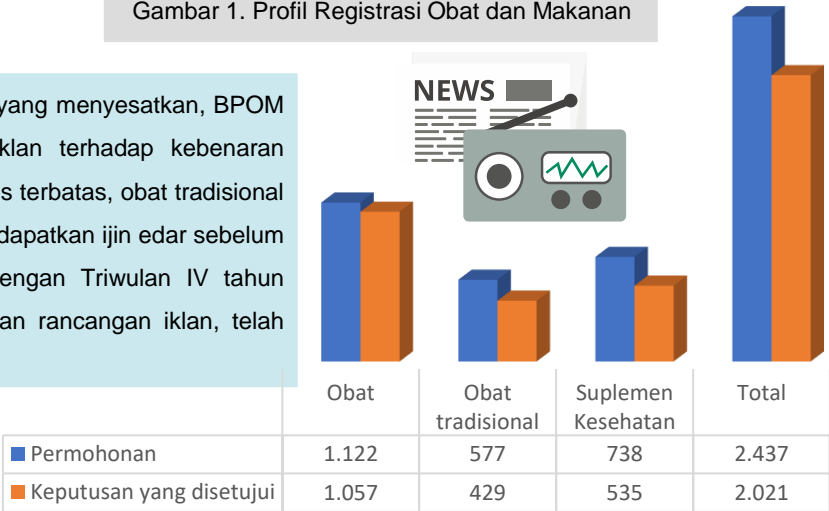
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh BPOM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, telah diterbitkan 183.323 keputusan dan 177.902 persetujuan izin edar dari 202.862 berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, BPOM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan ijin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, dari 2.437 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 2.021 (82,93%) iklan.



Gambar 2. Profil Pengawasan iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan

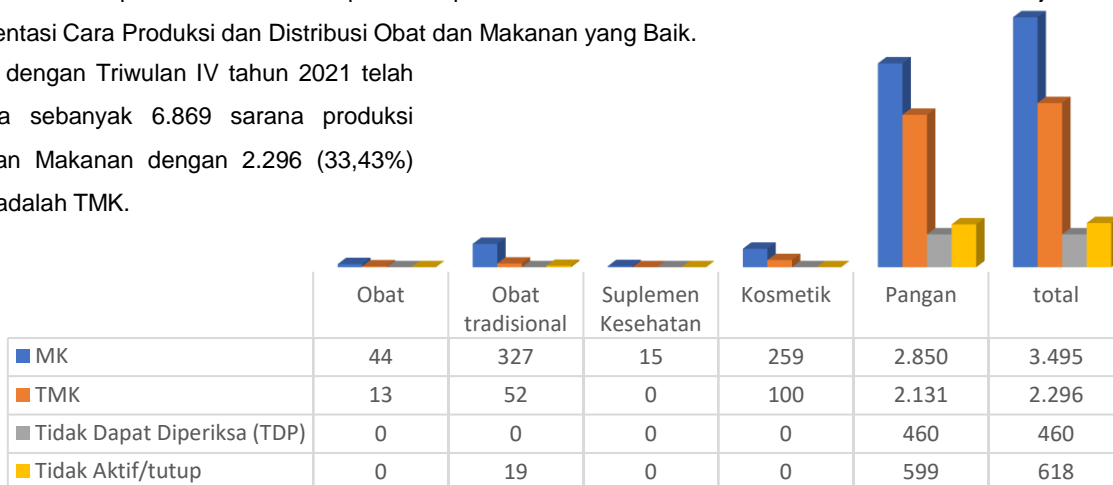
Pengawasan *post-market*

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

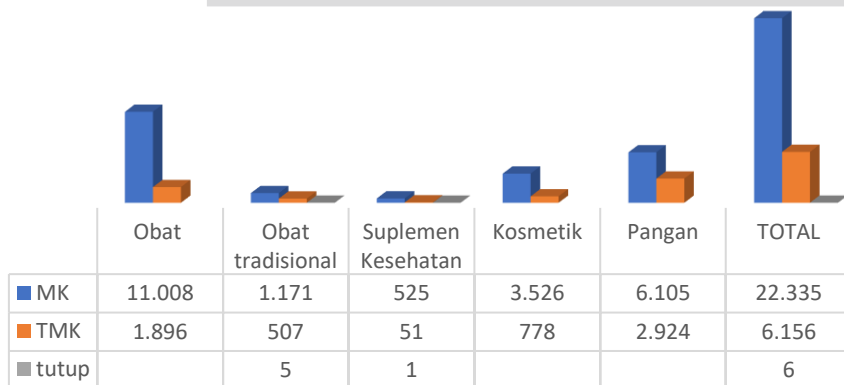
Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

BPOM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Baik.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 telah diperiksa sebanyak 6.869 sarana produksi Obat dan Makanan dengan 2.296 (33,43%) sarana adalah TMK.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan



Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 telah diperiksa 28.497 sarana distribusi Obat dan Makanan dengan 6.156 (21,60%) sarana adalah TMK.

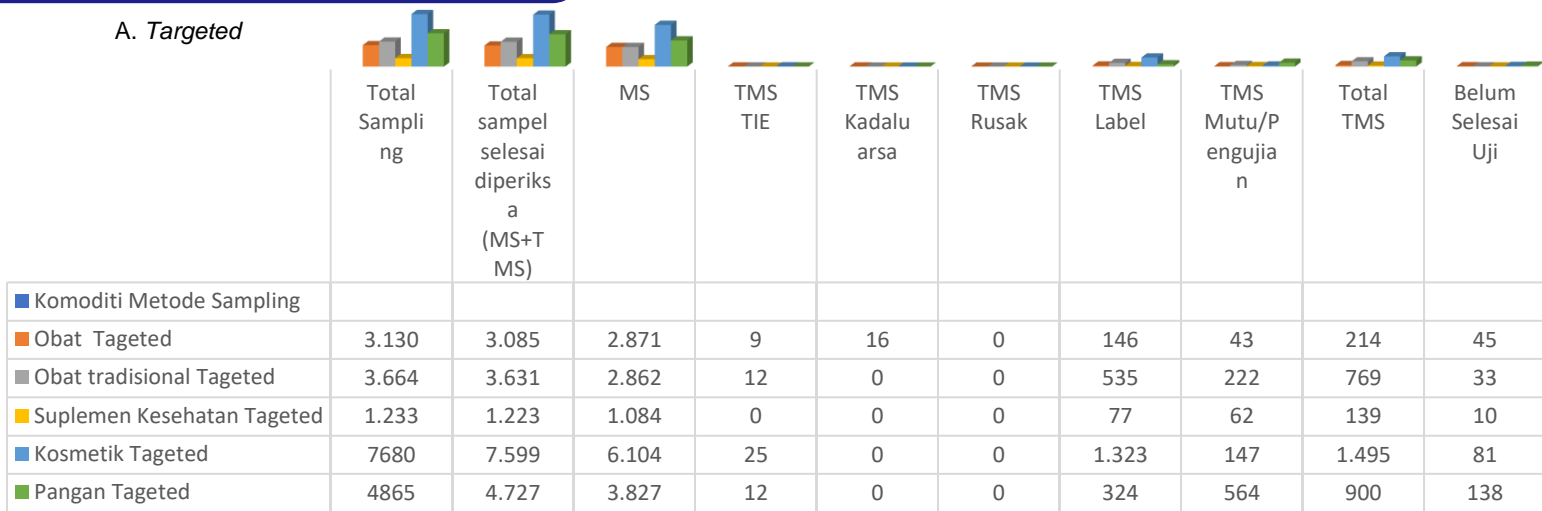
Keterangan:

MK = Memenuhi Ketentuan

TMK = Tidak Memenuhi Ketentuan

Sampling dan Pengujian Laboratorium

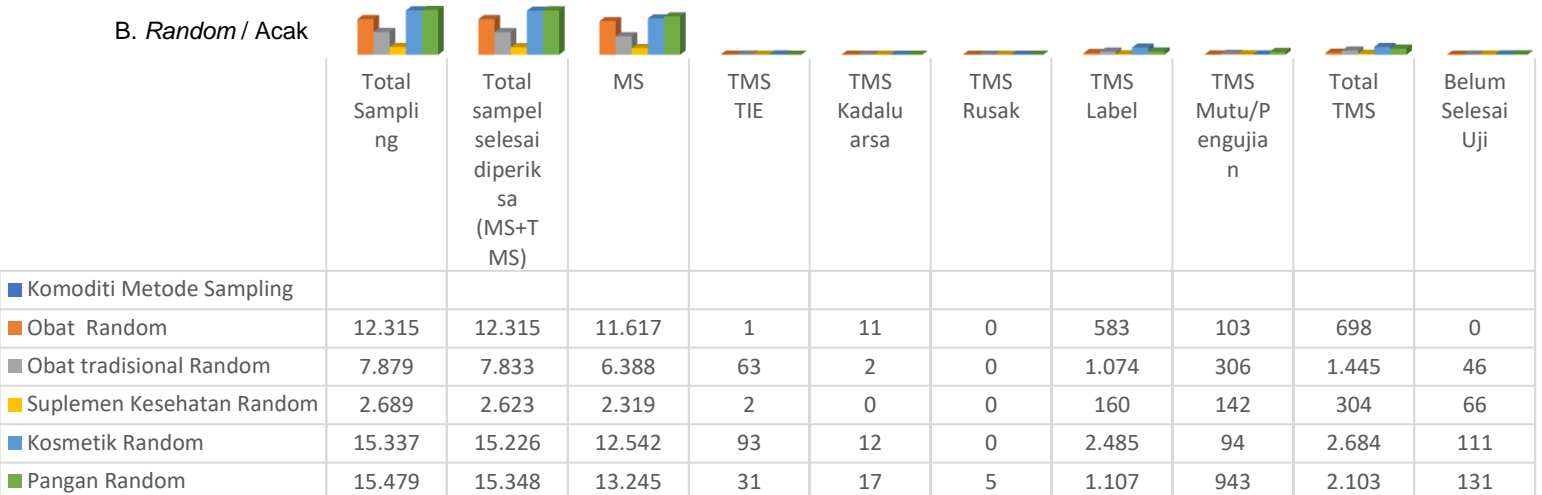
A. Targeted



Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted)

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, dari 20.572 sampel *targeted* yang disampling terdapat 20.265 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 3.517 (17,35%) sampel tidak memenuhi syarat.

B. Random / Acak



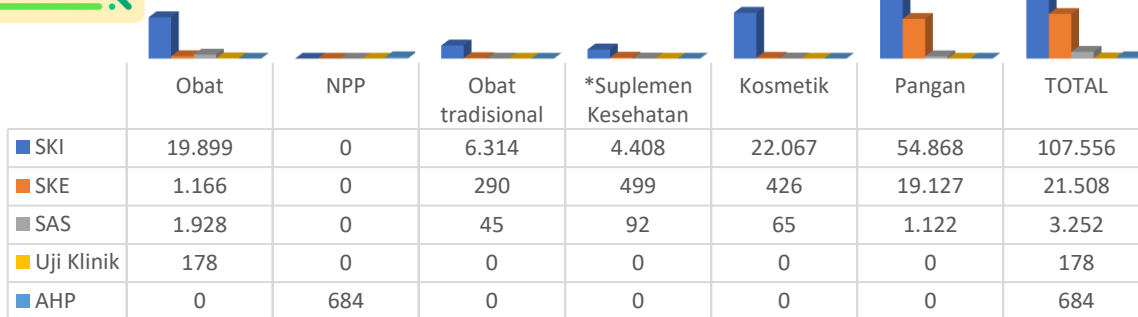
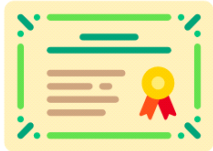
Sumber data:
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)

Keterangan:
MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat
TIE = Tanpa Izin Edar

Gambar 6. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, dari 53.699 sampel random yang disampling terdapat 53.345 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 7.234 (13,56%) sampel tidak memenuhi syarat.

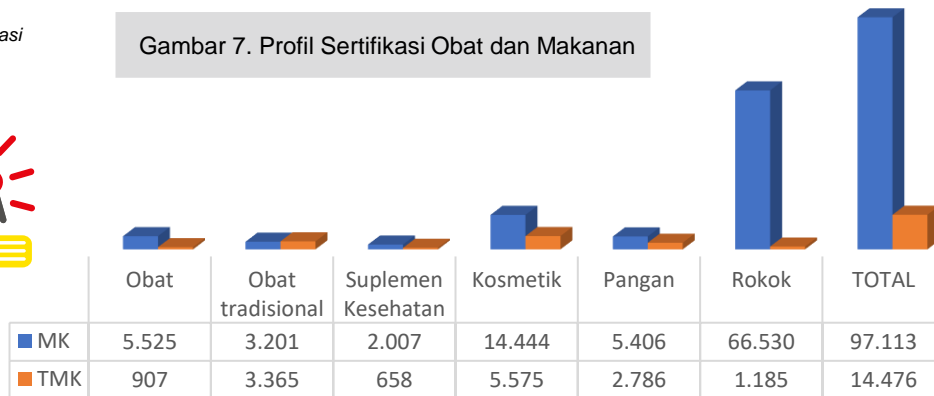
Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan Produk dan Bahan Baku yang masuk ke wilayah Indonesia, BPOM mengeluarkan Surat Keterangan impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (*Special Access Scheme*), Uji Klinik, dan Analisa Hasil Pengawasan (AHP) Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 telah diterbitkan 107.556 SKI, 21.508 SKE, 3.252 SAS, 178 Uji Klinik, dan 684 AHP Obat dan Makanan.



Keterangan::
* Termasuk Obat Kuasi

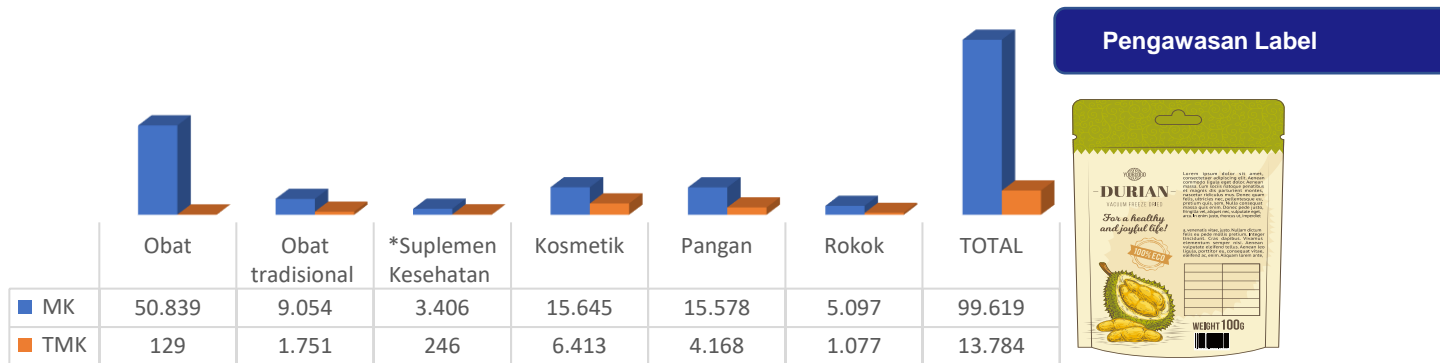
Gambar 7. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan

Pengawasan Iklan



Gambar 8. Profil Pengawasan iklan Obat dan Makanan

Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, BPOM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan leaflet/brosur. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, dari 111.589 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 14.476 (12,97%) iklan tidak memenuhi ketentuan.



Gambar 9. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan

Keterangan::
* Termasuk Obat Kuasi

BPOM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui BPOM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, dari 113.403 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 13.784 atau sekitar 12,15% label tidak memenuhi ketentuan.

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, BPOM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

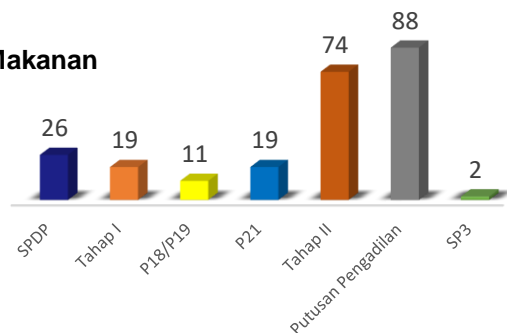
Komoditi	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindaklanjut	%
Obat	8.691	6.551	75,38
Obat Tradisional	65	65	100,00
Suplemen Kesehatan	54	54	100,00
Kosmetik	482	409	84,85

Gambar 10. Profil Laporan Efek Samping

II. Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal termasuk palsu serta obat keras di sarana yang tidak berwenang, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal).

Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti 239 perkara dengan jumlah nilai barang bukti sebesar Rp48.435.979.606,-. Sebanyak 26 perkara masih dalam tahap SPDP, 19 perkara pada tahap I, 11 perkara pada tahap P18/19, 19 perkara pada tahap P21, 74 perkara sudah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU (Tahap II), 88 perkara telah sampai pada putusan pengadilan, dan 2 perkara pada tahap pemberhentian penyidikan (SP3).



Gambar 11. Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia Indonesia Triwulan IV Tahun 2021

III. Standardisasi

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di bidang Obat dan Makanan.



Obat

Adanya *refocusing* anggaran, menyebabkan penurunan target *output* yang semula adalah 12 (dua belas) peraturan/standar/ pedoman obat saat ini menjadi 10 (sepuluh) peraturan/standar/pedoman obat yang sedang dalam proses penyusunan. Berikut 10 (sepuluh) peraturan/standar/pedoman obat beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan IV sebagai berikut:

1. Rancangan PerBPOM tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Sarana Pengolahan Produk Berbasis Sel, dan Jaringan Manusia (100%).
2. Keputusan Kepala Badan POM tentang Petunjuk Teknis Prinsip Penggunaan Obat Melalui Skema Perluasan Penggunaan Khusus (*Expanded Access Program*) pada Kondisi Darurat (100%).
3. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pelaporan Kegiatan Distribusi Obat dan Bahan Obat (100%).
4. Rancangan PerBPOM tentang Pengawasan Peredaran Obat Donasi di Wilayah Indonesia (100%).
5. Rancangan Perubahan Ketiga Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (100%).
6. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi (100%).

7. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Penetapan Informatorium Obat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia Edisi 3 (100%).
8. Standar Obat Non Kompendial (100%).
9. Standar Mutu Produk Radiofarmaka (100%).
10. Peraturan Badan POM tentang Metode Analisis, Standar dan/atau Persyaratan Obat dan Bahan Obat dalam Rangka Pengawasan Obat dan Bahan Obat (100%).



Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Terdapat 8 (delapan) peraturan/standar/pedoman obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang telah selesai disusun. Berikut 8 (delapan) peraturan/ standar/ pedoman obat beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan IV:

1. Rancangan Peraturan tentang Pedoman Teknis Pengawasan Tanaman Obat Tradisional Tertentu sebagai Obat Tradisional untuk Keperluan Khusus (100%).
2. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 32 tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional (100%).
3. Peraturan Badan POM tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan (Revisi Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan) (100%).
4. Peraturan Badan POM tentang Pengawasan dan Registrasi Obat Kuasi (100%).
5. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (100%).
6. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (100%).
7. Surat Keputusan Badan POM tentang Penetapan dan Pengawasan Vitamin D di atas 1000-4000 IU sebagai Suplemen Kesehatan untuk Keperluan Khusus pada Pandemi Covid-19 (100%).
8. Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.10.21.440 Tahun 2021 tentang Pemberian Satu Nomor Notifikasi untuk Kosmetika yang Dikemas oleh beberapa Industri Kosmetika di Wilayah Indonesia Selama Pandemi Covid-19 (100%).

Target jumlah kajian obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kajian, yang terdiri dari 60 (enam puluh) kajian di bidang Obat Tradisional, 55 (lima puluh lima) kajian di bidang suplemen kesehatan dan 15 (lima belas) kajian di bidang Kosmetik.

Sampai dengan Triwulan IV ini telah diselesaikan sebanyak 194 kajian yang terdiri dari 68 (enam puluh delapan) kajian di bidang Obat Tradisional, 93 (sembilan puluh tiga) kajian di bidang Suplemen Kesehatan dan 33 (tiga puluh tiga) kajian di bidang Kosmetik. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan *stakeholder*. Topik kajian dapat berupa bahan baku baru, jenis sediaan baru ataupun teknologi pembuatan produk yang baru.



Pangan

Karena kebijakan *refocusing* anggaran, target *output* yang semula 10 (sepuluh) peraturan/standar/pedoman pangan olahan, saat ini menjadi 9 (sembilan) peraturan/standar/pedoman pangan olahan. Berikut 9 (sembilan) peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan IV sebagai berikut:

1. Review Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan: Lampiran I-II (50%).
2. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan (100%).
3. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bahan Tambahan Pangan Campuran (100%).
4. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan (terkait Probiotik) (100%).
5. Rancangan Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang Pencantuman ING untuk Pangan Olahan yang diproduksi oleh Usaha Mikro dan Kecil (100%).
6. Pedoman Implementasi Regulasi Makanan Pendamping - Air Susu Ibu (MPASI) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (100%).
7. Amandemen Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (100%).
8. Pedoman Implementasi Kategori Pangan 16.0 (Pangan Siap Saji Terkemas) (100%).
9. Naskah Kebijakan (*Policy Paper*) Sinkronisasi Regulasi dan Standar Air Minum (termasuk Air Minum Dalam Kemasan dan Air Minum Isi Ulang) (100%).

Target jumlah kajian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 adalah 200 (dua ratus) kajian. Sampai dengan triwulan IV telah diselesaikan 283 (dua ratus delapan puluh tiga ribu) kajian. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari *stakeholder*.

IV. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan

Riset dan Kajian Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, selain itu data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi juga dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 7 topik riset dan kajian prioritas yang dilaksanakan BPOM pada tahun 2021 dengan progres triwulan IV sebagai berikut:

1. Kajian dalam rangka Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan POM (100%).
2. Desain dan Metodologi Survei Data Dasar Pengawasan Obat dan Makanan (100%).
3. Kajian Pengendalian Resistensi Antimikrobial (100%).
4. Riset dan Kajian Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan untuk Mendukung UMKM (100%).
5. Kajian Keamanan Pangan INARAC: Cemaran Mikroplastik dan *Emerging Issue* pada Air Minum dan Air Produksi Obat dan Makanan (100%).
6. Kajian Keamanan Pangan INARAC: Cemaran Arsen Inorganik dalam Produk Beras dan Produk Ikan (100%).
7. Kajian Evaluasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat Dan Makanan (DAK POM) (100%).

V. Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan

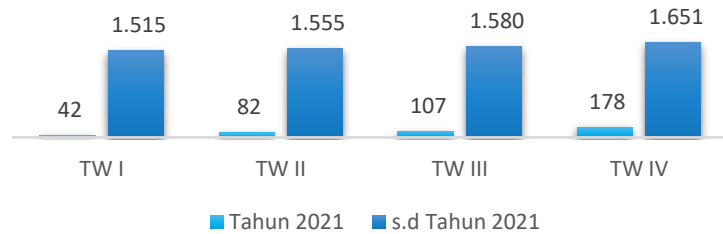
1. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Balai Besar/Balai POM untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP).

GLP (*Good Laboratory Practice*) yang dimaksud adalah Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Tahun 2020-2024 yang meliputi Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi, dan Standar Peralatan. Laboratorium Balai Besar/Balai POM (BB/BPOM) yang memenuhi standar kemampuan laboratorium adalah laboratorium BB/BPOM yang mencapai nilai sama dengan atau lebih dari *cut off* (>70%). Pemenuhan SKL diperoleh dari hasil asesmen laboratorium BB/BPOM menggunakan SKL Balai POM Tahun 2020-2024. Pengukuran capaian indikator Nilai Persentase Pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM dilakukan pada akhir tahun. Dari hasil penilaian pada triwulan IV terhadap 33 BB/BPOM, diperoleh 29 BB/BPOM dengan nilai SKL > 70%.

2. Metode Analisis (MA) yang dikembangkan

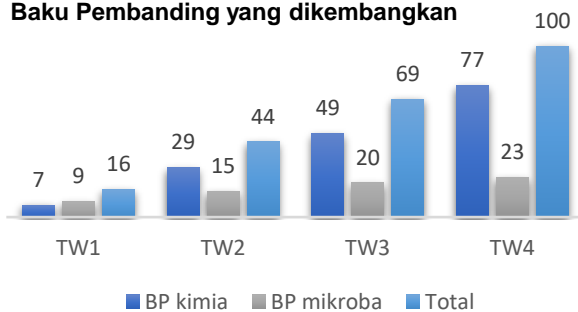
BPOM terus mengembangkan metode analisis (MA) Obat dan Makanan agar laboratorium BPOM dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar. Pengembangan metode analisis (MA) dilakukan untuk komoditi obat, NAPPZA, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan air, produk biologi, mikrobiologi dan biologi molekuler. Hasil pengujian digunakan untuk membuat kebijakan bahkan penindakan terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Pada tahun 2021, sampai dengan Triwulan IV telah dikembangkan sebanyak 178 MA, sehingga MA yang dikembangkan kumulatif dari tahun 2015 sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 adalah sebanyak 1.651 MA (75,25%) dari MA yang ditargetkan s.d Tahun 2024.



Gambar 12. Grafik Metode Analisis yang Dikembangkan Triwulan IV Tahun 2021

3. Baku Pembanding yang dikembangkan

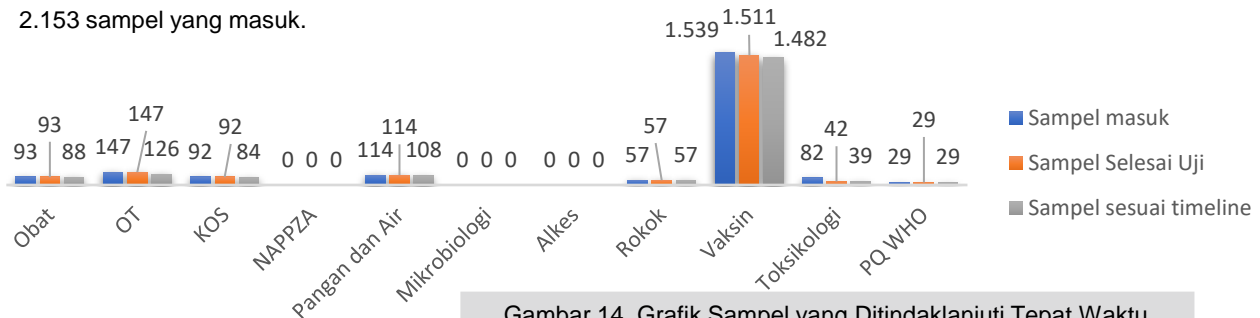


Gambar 13. Grafik Baku Pembanding yang dimanfaatkan Triwulan IV Tahun 2021

Pengembangan Baku Pembanding (BP) dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar/ Balai POM untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan melalui pengujian laboratorium. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 telah dikembangkan 100 baku pembanding, terdiri dari 77 BP kimia dan 23 BP mikroba.

4. Sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu

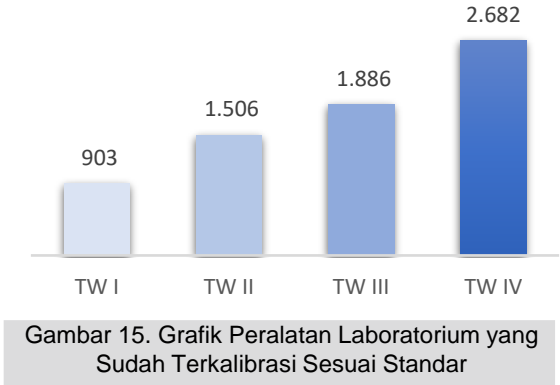
BPOM selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder* melalui pelayanan pengujian Obat dan Makanan termasuk sampel pengujian produk biologi dan sampel *lot release* vaksin dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat, yaitu dengan pemenuhan *timeline* pengujian sampel Obat dan Makanan. Target persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah 92%. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, terdapat 2.013 (93,49%) sampel yang sesuai *timeline* dari 2.085 (96,55%) sampel yang selesai uji dan 2.153 sampel yang masuk.



Gambar 14. Grafik Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

5. **Alat Pengujian Laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai Standar**

Untuk menjamin validitas pengujian Obat dan Makanan di laboratorium diperlukan alat yang sudah terkalibrasi sesuai dengan standar. Target alat ukur laboratorium BPOM yang dikalibrasi pada tahun 2024 adalah 3.528 alat sedangkan target pada tahun 2021 sebesar 87% (3.061 alat). Karena kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19, dilakukan penyesuaian target pada tahun 2021 menjadi 82% (2.893 alat). Pada tahun 2021, Balai Kalibrasi telah melakukan kalibrasi alat sebanyak 2.682 alat.



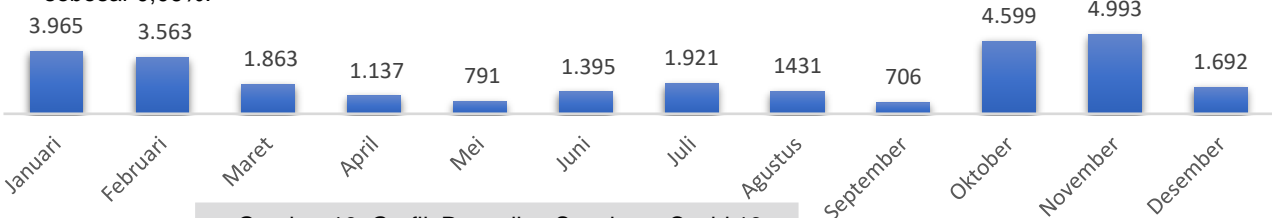
Gambar 15. Grafik Peralatan Laboratorium yang Sudah Terkalibrasi Sesuai Standar

6. **Jejaring Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif**

Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, *sharing* informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, *workshop*, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan BPOM dan laboratorium non-BPOM sesuai lingkup pengujian/ keahlian. Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, telah terlaksana kegiatan 7 jejaring dari target 7 jejaring yaitu Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) pengujian Bahan Tambahan Pangan dalam Pangan Olahan, LRPPI pengujian Mikotoksin dalam Pangan Olahan, LRPPI Pengujian Cemaran Logam dan Mineral dalam Pangan Olahan, LRPPI Pengujian Bahan Kontak Pangan, LRPPI pengujian Mikrobiologi dalam Pangan Olahan, LRPPI pengujian GMO dan DNA spesifik spesies dalam pangan olahan dan Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI).

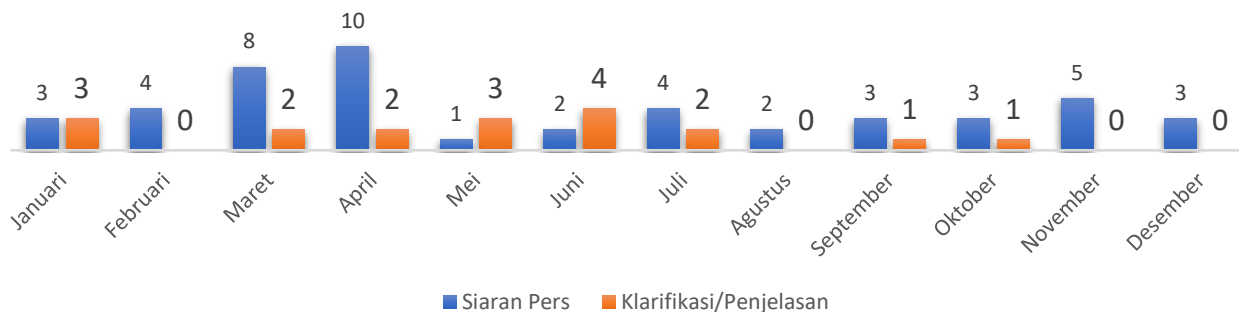
7. **Pengujian Sampel Spesimen Covid-19**

Di masa pandemi, BPOM berkontribusi dalam pengujian sampel spesimen Covid-19 yang dilakukan di Laboratorium *Biohazard* Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, spesimen Covid-19 yang diuji di Laboratorium *Biohazard* sebanyak 28.056 spesimen, di mana *positivity rate* berangsur mengalami penurunan sejak bulan Juli dengan *positivity rate* terendah terjadi pada bulan Desember sebesar 0,06%.



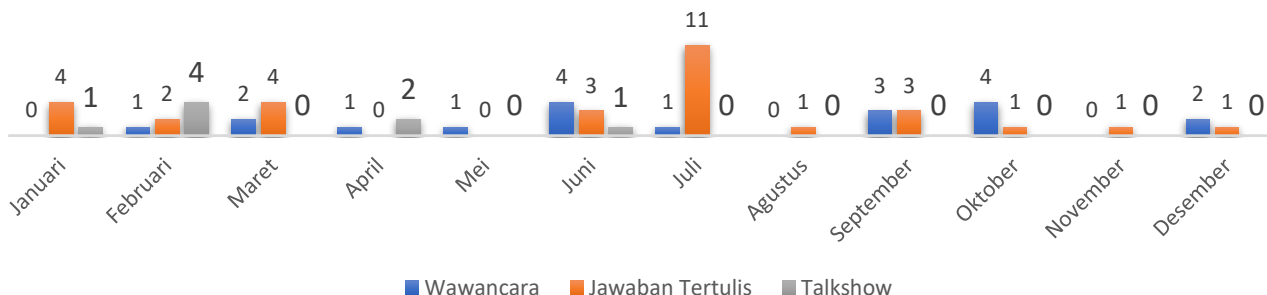
Gambar 16. Grafik Pengujian Spesimen Covid 19

VI. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat



Gambar 17. Grafik Penerbitan Siaran Pers

Hingga triwulan IV tahun 2021, Badan POM telah menerbitkan 48 (empat puluh delapan) siaran pers dan 18 (delapan belas) penjelasan/klarifikasi Badan POM terkait isu Obat dan Makanan. Selama Januari – Desember 2021, penerbitan siaran pers paling banyak terjadi di bulan April yaitu sebanyak 10 (sepuluh) terbitan sedangkan penjelasan/klarifikasi paling banyak dipublikasikan di bulan Juni, yaitu 4 (empat) penjelasan. Pada triwulan ini, bahasan isu bervariasi dari berbagai komoditas, antara lain obat, OTSKK (Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik), pangan olahan, dan umum/kinerja. Namun sepanjang 2021, bahasan topik yang paling sering dibahas dalam siaran pers dan penjelasan/klarifikasi berasal dari komoditas obat atau Kedeputan 1. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi berita dipublikasikan melalui *website* dan media sosial Badan POM.



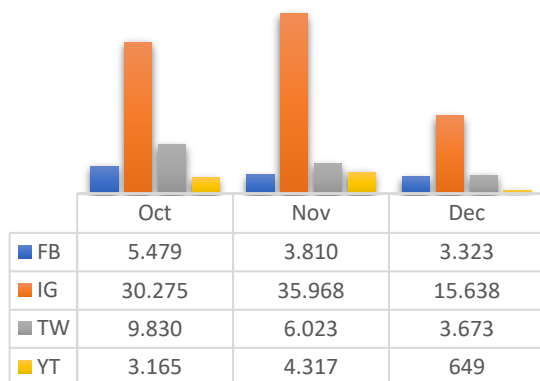
Gambar 18. Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi Kepada Media

Hingga triwulan IV tahun 2021, Badan POM melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada media berupa wawancara dan/atau *talkshow* serta pemberian jawaban secara tertulis, dengan rincian kegiatan pelayanan informasi yang dilakukan adalah 20 (dua puluh) wawancara langsung, 8 (delapan) *talkshow*, dan 31 (tiga puluh satu) pemberian jawaban secara tertulis.

Badan POM juga aktif menyampaikan informasi seputar kegiatan strategis yang dilakukan melalui berita aktual yang diunggah pada *website* resmi Badan POM dan disebarakan ke media massa. Tercatat 176 (seratus tujuh puluh enam) berita aktual yang telah dipublikasikan, yang merupakan hasil peliputan kegiatan Badan POM dari Januari hingga Desember 2021. Adapun peliputan kegiatan Badan POM yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021 sebanyak 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kegiatan, baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar kota. Tidak semua peliputan kegiatan Badan POM dijadikan berita aktual, pertimbangan ini dilakukan berdasarkan penilaian strategis kegiatan.

Pada triwulan IV tahun 2021, aktivitas media sosial Badan POM pada 4 platform media sosial yaitu *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* dan *Youtube* mencapai 1.169 unggahan, dengan rata-rata unggahan adalah 2-3 unggahan per hari. Platform *Twitter* adalah platform yang memiliki aktivitas tertinggi sebanyak 685 tweets dibandingkan dengan 3 platform media sosial lainnya. Aktivitas tertinggi kedua adalah *Instagram* dengan 275 unggahan, menyusul *Facebook* sebanyak 171 unggahan, serta *Youtube* sebanyak 38 unggahan.

Sementara itu, pertumbuhan audiens/khalayak/pengunjung pada triwulan IV terhadap 4 platform media sosial terpantau fluktuatif. *Instagram* merupakan platform dengan total audiens/ khalayak/pengunjung tertinggi di triwulan IV ini dengan jumlah audiens/khalayak/pengunjung sebanyak 9.225 audiens, sementara di peringkat kedua ada platform *Youtube* dengan jumlah 2.734 audiens, dilanjutkan dengan *Twitter* dengan jumlah audiens sebanyak 1.910 platform, dan *Facebook* dengan 389 audiens. Pertumbuhan audiens tertinggi terjadi pada November, yaitu sebesar 8.175 audiens, disusul Oktober (4.596 audiens) dan Desember (1.487 audiens). Pertumbuhan audiens tertinggi di bulan November dipengaruhi oleh unggahan konten Produk Kosmetika Bermerkuri berdasarkan Data Kerawanan Kejahatan pada tanggal 12 November 2021. Tercatat terjadi peningkatan audiens yang cukup signifikan sejak 12-15 November 2021 sebesar 1.144 audiens.



Gambar 19. Profil *Engagement* Media Sosial Badan POM

Pada triwulan IV, *engagement* pada setiap platform cenderung fluktuatif. *Engagement* tertinggi terjadi pada bulan November, dengan jumlah 50.118, diikuti bulan Oktober 48.749, dan Desember sebesar 23.283. Pertumbuhan jumlah *engagement* terlihat fluktuatif di 4 platform tersebut. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada bulan November karena adanya konten Pengawasan Kosmetika Bermerkuri oleh Badan POM dengan *insight* sebesar 13.500 dan Waspada Obat dan Makanan yang diselundupkan di Wilayah Perbatasan dengan *insight* sebesar 13.200.

Total *engagement* selama periode Januari sampai dengan Desember tercatat sebesar 418.972, dengan *engagement* mencapai puncaknya pada bulan Juli, dengan angka 92.457, dan yang paling rendah terjadi pada bulan Februari yaitu 22.761. Tingginya *engagement* pada bulan Juli disebabkan karena adanya informasi penerimaan CPNS, penerbitan *Emergency Use Authorization* (EUA) untuk vaksin COVID-19, yaitu Comirnaty Pfizer dan Moderna, kebakaran gedung Badan POM, penggunaan vaksin Sinovac untuk anak 12-17 tahun, serta penggunaan Ivermectin dalam kerangka uji klinik. Sedangkan rendahnya *engagement* pada Februari terjadi karena kurang optimalnya perencanaan publikasi di media sosial dan kurangnya isu-isu seputar obat dan makanan pada bulan tersebut. *Top engagement content* terkait BPOM pada keempat *platform* dapat dilihat pada gambar berikut:



Bulan	Positif	Netral	Negatif	Total
Januari	1.887	2.203	1	4.091
Februari	1.142	1.615	1	2.758
Maret	1.240	2.678	0	3.918
April	1.255	2.819	7	4.081
Mei	947	1.751	0	2.698
Juni	1.065	1.331	26	2.422
Juli	1.566	2.678	16	4.260
Agustus	981	1.094	2	2.077
September	1.173	1.171	0	2.344
Oktober	1.301	1.119	1	2.439
November	1.084	1.327	12	2.432
Desember	1.084	1.327	0	2.411

Gambar 20. Jumlah Pemberitaan tentang Badan POM sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021

Selama tahun 2021 terdapat 35.931 pemberitaan terkait Badan POM. Pemberitaan tersebut terdiri dari pemberitaan terkait Obat dan Makanan secara umum dan Badan POM secara khusus. Dari 35.931 pemberitaan tersebut, distribusi sentimen berita mengenai Badan POM didominasi pemberitaan bertonasi netral, yaitu sebanyak 20.782 berita (57,84%), diikuti dengan pemberitaan bertonasi positif sebanyak 15.083 berita (41,98%) dan 66 berita (0,18%) bertonasi negatif.

Berdasarkan jenis media, pemberitaan terkait Badan POM didominasi oleh pemberitaan melalui media *online*, yaitu sebanyak 32.547 berita (90,58%), selanjutnya diikuti 2.600 berita (7,24%) melalui media cetak dan 784 berita (2,18%) melalui media elektronik.



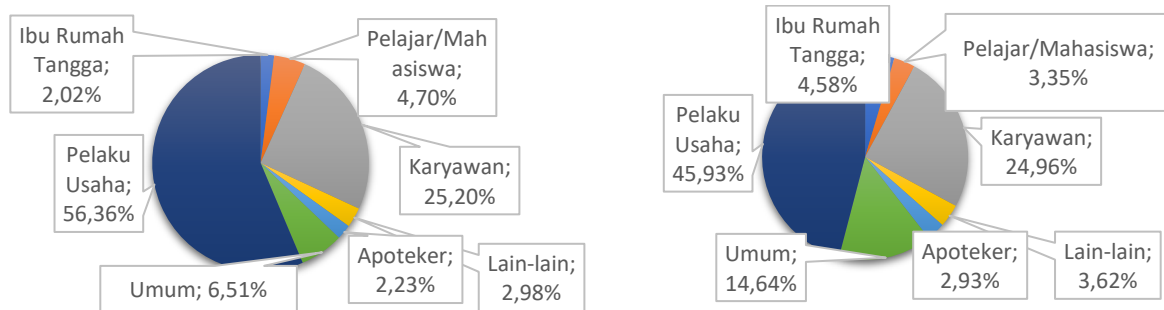
Gambar 21. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media

Pada bulan Februari terdapat 2 kali penerbitan EUA yaitu untuk vaksin CoronaVac yang diizinkan digunakan untuk lansia serta vaksin COVID-19 produksi Bio Farma, kedua EUA tersebut cukup banyak menarik perhatian media. Pada April 2021, jumlah pemberitaan mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah pemberitaan terkait polemik vaksin Nusantara gagasan Terawan Agus Putranto. Puncaknya adalah dilakukannya uji klinik fase kedua vaksin Nusantara terhadap beberapa tokoh, anggota DPR RI, politisi dan ditutup dengan pemberitaan terkait Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan, Badan POM dan TNI AD yang mengubah status vaksin Nusantara menjadi vaksin berbasis penelitian.

Pada Juli 2021, pemberitaan mengenai temuan Badan POM pada PT Harsen terkait promosi berlebihan Ivermectin dan Indofarma yang mempunyai izin edar untuk ivermectin serta EAP untuk Ivermectin. Badan POM kemudian menerbitkan keterangan resmi yang menjelaskan bahwa Ivermectin masih dalam tahap uji klinik dan melarang berbagai pihak mempromosikannya sebagai obat COVID-19. Selain itu pemberitaan juga didominasi mengenai Penerbitan EUA vaksin Moderna dan Pfizer. Sementara pada bulan September 2021, pemberitaan didominasi oleh isu Susu Kental Manis (SKM) terkait pernyataan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang disebut melarang SKM dikonsumsi dengan cara diseduh. Badan POM kemudian menerbitkan keterangan resmi yang menjelaskan klarifikasi bahwa SKM tidak untuk menggantikan ASI dan tidak cocok dikonsumsi oleh bayi sampai usia 12 bulan dan SKM tidak dianjurkan sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu. Pemberitaan juga masih terkait vaksin yaitu penerbitan EUA vaksin Janssen serta vaksin Convidecia.

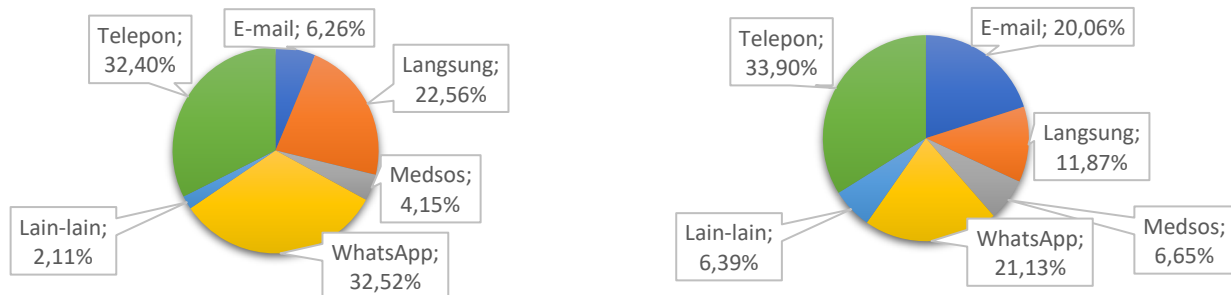
Memasuki triwulan keempat di tahun 2021, pada bulan November 2021, pemberitaan tentang vaksin terus berlanjut kali ini adalah penerbitan EUA vaksin Sinovac dan vaksin produksi Bio Farma untuk anak usia 6-11 tahun. Kemudian di bulan Desember 2021 pemberitaan mengenai BPOM di media yaitu mengenai vaksin Sinovac terkait penggunaannya untuk vaksinasi anak usia 6-11 tahun dan juga perihal intensifikasi pengawasan pangan jelang Natal dan Tahun Baru.

Berdasarkan data layanan informasi dan pengaduan masyarakat periode Januari-Desember tahun 2021, Badan POM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPK Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia serta Contact Center HaloBPOM 1500533 sebanyak 52.219 layanan, terdiri dari 50.340 (96,40%) layanan permintaan informasi dan 1.879 (3,60%) layanan pengaduan.



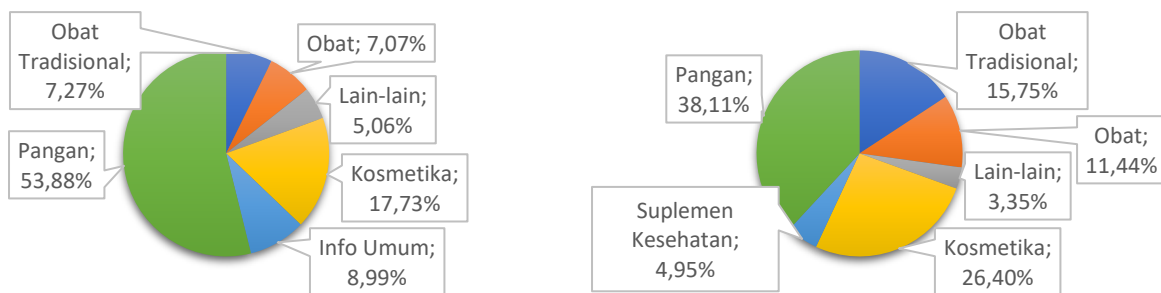
Gambar 22. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi

Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 28.372 (56,36%) layanan dan karyawan sebanyak 12.684 (25,20%) layanan. Adapun pengaduan sebagian besar dari pelaku usaha sebanyak 863 (45,93%) layanan dan karyawan sebanyak 469 (24,96%) layanan.



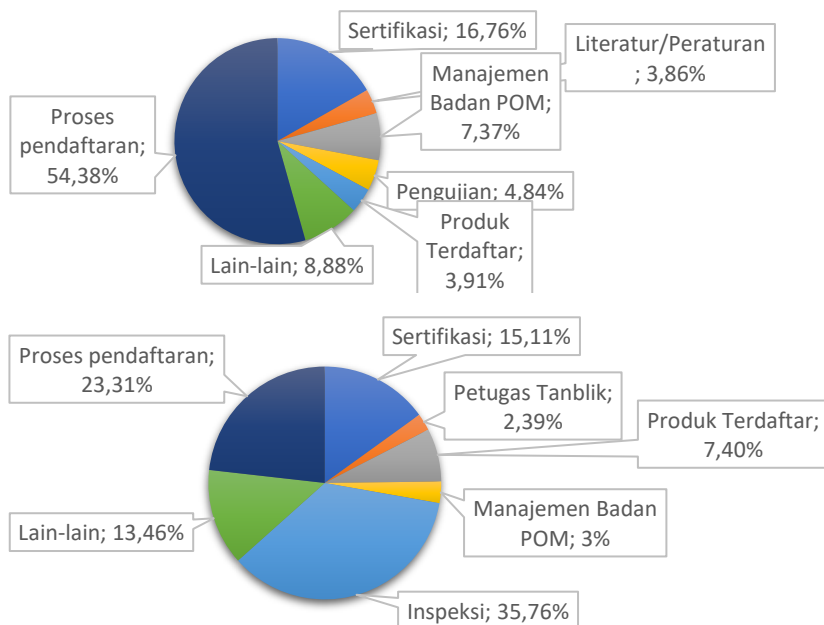
Gambar 23. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Jenis Media

Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu melalui aplikasi WhatsApp sebanyak 16.371 (32,52%) layanan dan telepon sebanyak 16.309 (32,40%) layanan. Adapun media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan yaitu melalui telepon sebanyak 637 (33,90%) dan aplikasi WhatsApp sebanyak 397 (21,13%) layanan.



Gambar 24. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi

Komoditi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait informasi pangan sebanyak 27.124 (53,88%) layanan dan kosmetika sebanyak 8.925 (17,73%) layanan. Adapun komoditi yang banyak diadukan juga yaitu pangan sebanyak 716 (38,11%) layanan dan kosmetika sebanyak 496 (26,40%) layanan.



Gambar 25. Topik Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM

Adapun topik pengaduan yang banyak diadukan sebagian besar yaitu tentang inspeksi sebanyak 672 (35,76%) layanan dan keluhan terkait proses pendaftaran sebanyak 438 (23,31%) layanan.

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu informasi terkait proses pendaftaran sebanyak 27.375 (54,38%) layanan dan proses sertifikasi sebanyak 8.437 (16,76%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain tentang manajemen umum, seperti penerimaan CPNS BPOM, informasi magang/penelitian, informasi nomor kontak dan alamat unit di BPOM, pengujian laboratorium, produk terdaftar, peraturan terkait pengawasan Obat dan Makanan, desain kemasan, produsen/distributor, klarifikasi *Public Warning*, indikasi/khasiat, label halal, bahan tambahan pangan, tanggal kedaluwarsa.

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan* Triwulan IV Tahun 2021



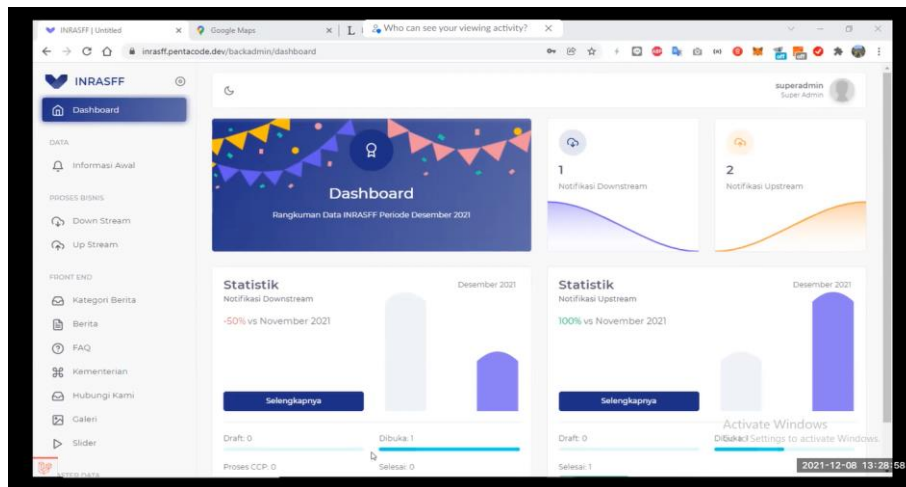
*KIE oleh Biro Hukum dan Organisasi

VII. Digitalisasi Pelayanan Publik

1. Pengembangan Aplikasi INRASFF

Aplikasi *Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed* (INRASFF), merupakan sistem yang dibangun sebagai komunikasi antar Kementerian dan Tim INRASFF, untuk memberikan peringatan dini dan percepatan tindak lanjut terhadap kejadian dalam keamanan pangan. Menu yang dibangun diantaranya:

- Modul *dashboard*
- Modul informasi awal/data
- Modul proses *downstream* dan *upstream*, sebagai modul utama komunikasi



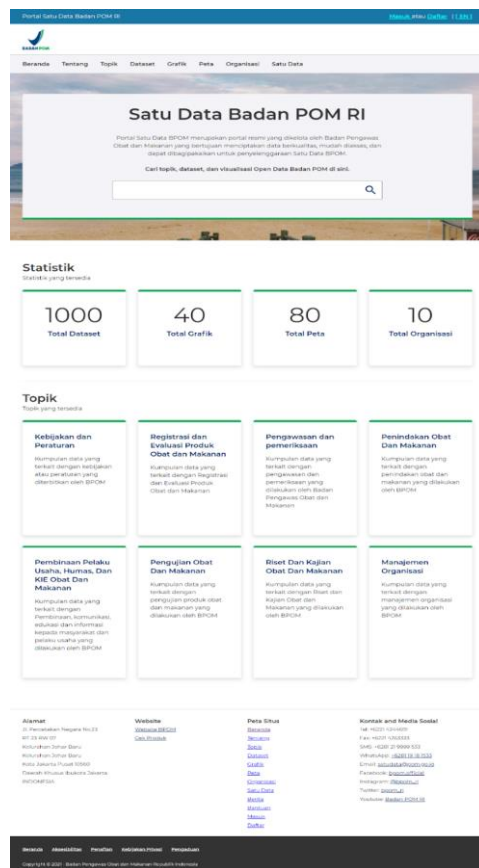
Gambar 26. Tampilan *Dashboard* Aplikasi INRASFF Pengembangan Tahun 2021

2. Satu Data Obat dan Makanan

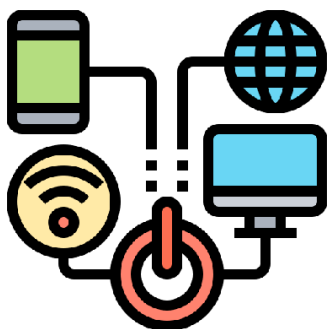
Satu Data menurut Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bahwa Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Satu Data Indonesia sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang berisi transformasi dari era *e-Government* menuju *i-Government* (*integrated Government*), merupakan penerapan *smart government* yaitu sistem yang saling terintegrasi satu dan lainnya sehingga antar sistem dapat berinteraksi dan menghasilkan data yang dapat saling mendukung proses antar sistem.

BPOM telah berproses menuju Satu Data untuk mempermudah pengawasan obat dan makanan, sekaligus agar tersedia data BPOM yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Sampai saat ini BPOM telah melaksanakan Manajemen Data dan Informasi yang melibatkan pengelolaan sistem informasi, pengelolaan data dan pengelolaan infrastruktur.

Portal Satu Data BPOM merupakan sarana dalam berbagi pakai data baik internal ataupun eksternal BPOM. Data yang tersedia dalam portal Satu Data BPOM sudah memenuhi kaidah dari prinsip Satu Data Indonesia antara memiliki standar data, metadata, kode referensi dan dapat dibagipakaikan. Pada portal Satu Data BPOM tersedia beberapa menu antara lain topik, dataset, grafik, peta dan organisasi. Secara garis besar portal Satu Data BPOM terdiri 2 jenis akses yaitu Open Data dan Satu Data. Data yang tersedia dalam Open Data dapat diakses publik tanpa memerlukan akses, sementara Satu Data memerlukan akses tersendiri.



Gambar 27. Portal Satu Data BPOM



VIII. Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, telah ditetapkan 33 (Tiga Puluh Tiga) Peraturan Badan POM, 114 (Seratus Empat Belas) Keputusan Kepala Badan POM, 83 (Delapan Puluh Tiga) Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 (Satu) Rancangan Undang-Undang dan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

1 Judul RUU



Rancangan Undang-Undang:

Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan

3 Judul RPP



Rancangan Peraturan Pemerintah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan



33 Judul Peraturan Badan POM

Peraturan Badan POM :

1. Peraturan Badan POM Nomor 1 tahun 2021 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan
2. Peraturan Badan POM Nomor 2 tahun 2021 Tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat
3. Peraturan Badan POM Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Melalui Penyesuaian/Inpassing
4. Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2021 Tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan
5. Peraturan Badan POM Nomor 5 tahun 2021 Tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol
6. Peraturan Badan POM Nomor 6 tahun 2021 Tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan
7. Peraturan Badan POM Nomor 7 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pom Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

8. Peraturan Badan POM Nomor 8 tahun 2021 Tentang Bentuk Dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu Yang Dapat Di Produksi Oleh Industri Kosmetika Yang Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B
9. Peraturan Badan POM Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Badan POM
10. Peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan
11. Peraturan Badan POM Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pom No 13 Tahun 2020 Tentang Bahan Tambahan Pangan Perisa
12. Peraturan Badan POM Nomor 12 tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Dan Menu Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2021
13. Peraturan Badan POM Nomor 13 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat
14. Peraturan Badan POM Nomor 14 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik
15. Peraturan Badan POM Nomor 15 tahun 2021 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Kantor Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
16. Peraturan Badan POM Nomor 16 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota Dan Penyuluh Keamanan Pangan
17. Peraturan Badan POM Nomor 17 tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik
18. Peraturan Badan POM Nomor 18 tahun 2021 Tentang Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional
19. Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetika
20. Peraturan Badan POM Nomor 20 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pom Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
21. Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2021 Tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Dan Mutu Pangan Olahan Di Sarana Peredaran
22. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik

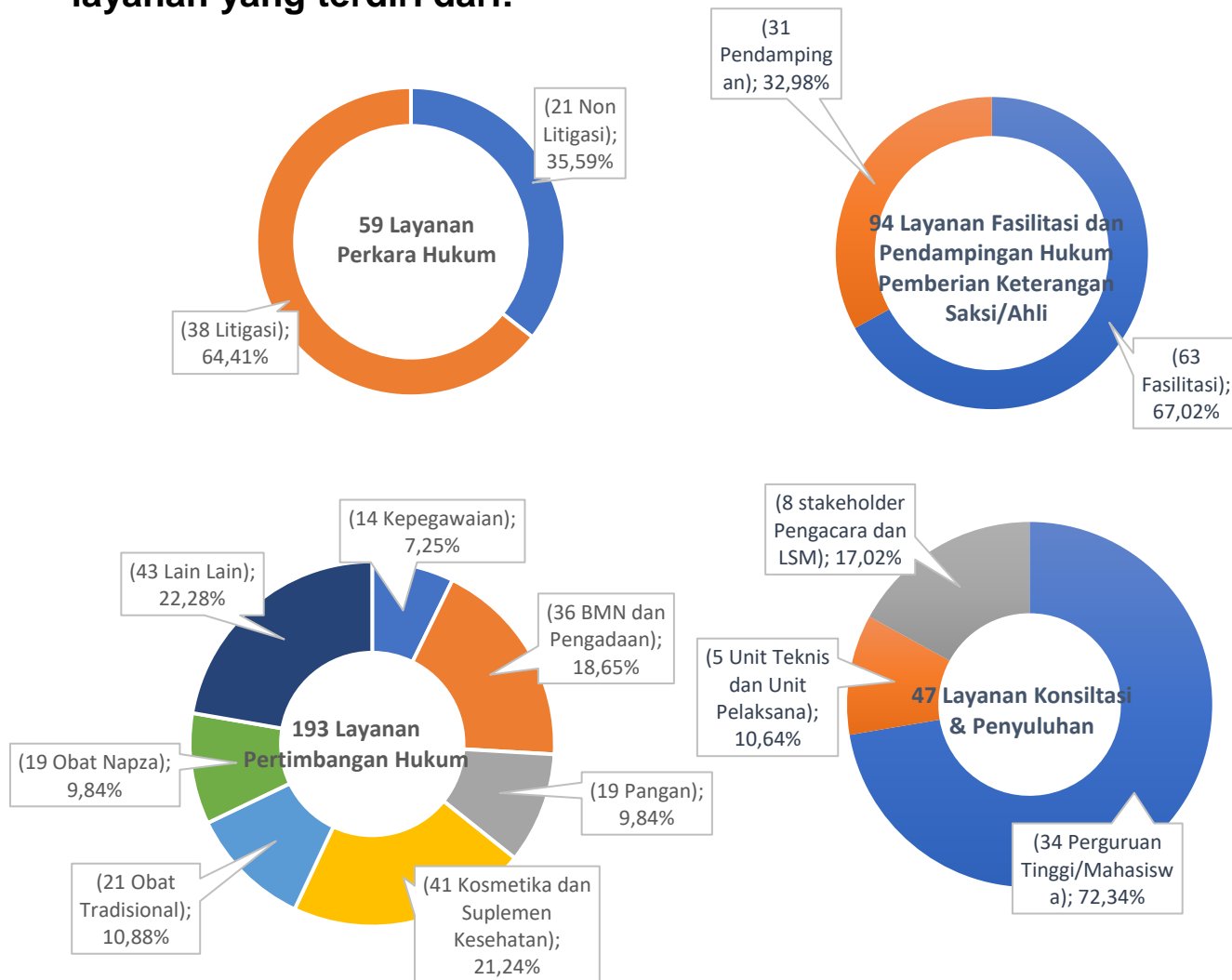
23. Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dilingkungan Badan POM
24. Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
25. Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik
26. Peraturan Badan POM Nomor 26 tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan
27. Peraturan Badan POM Nomor 27 tahun 2021 Tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis
28. Peraturan Badan POM Nomor 28 tahun 2021 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.52.08.12.5545 Tahun 2012 tentang Batas Maksimum Nitrit dalam Sarang Burung Walet
29. Peraturan Badan POM Nomor 29 tahun 2021 Tentang Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran
30. Peraturan Badan POM Nomor 30 tahun 2021 Tentang Persyaratan Penambahan Zat Gizi Dan Zat Nongizi Dalam Pangan Olahan
31. Peraturan Badan POM Nomor 31 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
32. Peraturan Badan POM Nomor 32 tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika
33. Peraturan Badan POM Nomor 33 tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik

IX. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, telah ditetapkan 33 (Tiga Puluh Tiga) Peraturan Badan POM, 114 (Seratus Empat Belas) Keputusan Kepala Badan POM, 83 (Delapan Puluh Tiga) Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 (Satu) Rancangan Undang-Undang dan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021

Jumlah layanan advokasi hukum yang diberikan sejumlah 393 layanan yang terdiri dari:



X. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan sebagai upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan baik di unit kerja Pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM. Sebagai bentuk perkuatan kelembagaan UPT BPOM di Provinsi Kalimantan Utara telah ditetapkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Selain itu, telah dibentuk Tim Pelaksana Persiapan Operasionalisasi Balai POM di Tarakan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.12.21.281 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Persiapan Operasionalisasi Balai POM di Tarakan. Pembentukan Tim Pelaksana bertujuan untuk melaksanakan dan/atau memberikan pendampingan dan dukungan administratif sehingga target operasionalisasi Balai POM di Tarakan dapat dimulai secara efektif pada tahun anggaran 2022.

UPT BPOM	Jumlah	
	Sebelum (PerBPOM 22/2020)	Sesudah (PerBPOM 23/2021)
Balai Besar POM	21	21
Balai POM	12	13
Loka POM	40	39

BPOM melakukan evaluasi kelembagaan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan BPOM dilaksanakan terhadap 2 (dua) dimensi, terdiri atas dimensi struktur organisasi dan dimensi proses organisasi. Perolehan nilai akhir evaluasi kelembagaan BPOM tahun 2021 adalah 86,52 dengan peringkat komposit 5 (P-5) atau dapat disimpulkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi BPOM dinilai tergolong sangat efektif. Berdasarkan hasil evaluasi dapat digambarkan bahwa struktur dan proses organisasi yang ada mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Berkenaan dengan hal tersebut, BPOM telah menyampaikan hasil evaluasi kelembagaan BPOM melalui Surat Kepala BPOM kepada Menteri PANRB Nomor OT.01.02.1.2.11.21.116 hal Laporan Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2021. Verifikasi telah dilakukan melalui pembahasan dengan Kementerian PANRB pada tanggal 23 Desember 2021.

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2021

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan Kementerian PANRB Tahun 2020 melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/23/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021, Indeks RB BPOM mengalami kenaikan dari 80,12 menjadi 83,51 dengan kategori “A” (Sangat Baik) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2020
A	Komponen Pengungkit		
	i. Pemenuhan	20,00	18,44
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,85
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	1,94
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	3,00	2,93
4	Penataan Tata Laksana	2,50	2,10
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	3,00	2,84
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,17
7	Penguatan Pengawasan	2,50	2,34
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,28
	ii. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	7,49
	iii. Reform	30,00	22,87
1	Manajemen Perubahan	3,00	2,71
2	Deregulasi Kebijakan	3,00	2,31
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	4,50	4,44

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2020
4	Penataan Tata Laksana	3,75	2,90
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	4,50	1,83
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	1,79
7	Penguatan Pengawasan	3,75	3,60
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,30
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	48,80
B	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,50
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,10
3	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,50
4	Kinerja Organisasi	3,00	7,61
Total Komponen Hasil (B)		40,00	34,71
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00	83,51

3. Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Penilaian internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM bertujuan untuk mendorong UPP melakukan peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik menuju pelayanan prima, yaitu pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh penyelenggara layanan kepada penerima. Hasil penilaian internal kinerja UPP di lingkungan BPOM dapat dijadikan sebagai acuan untuk pemilihan lokus UPP yang diikuti pada penilaian evaluasi kinerja UPP oleh Kementerian PANRB tahun 2021.

Penilaian internal kinerja UPP di lingkungan BPOM dilakukan pada April s.d. Juni 2021 oleh tim penilai internal yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.04.21.205 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM. Penilaian dilakukan melalui aplikasi evortala.pom.go.id terhadap 47 (empat puluh tujuh) UPP di lingkungan BPOM.

4. Pelaksanaan Audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilans QMS ISO 9001:2015 BPOM

a. Exit Meeting Pelaksanaan Audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilans QMS ISO 9001:2015 BPOM

Kegiatan *exit meeting* ISO 9001:2015 merupakan pertemuan penutup pelaksanaan audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilans ISO 9001:2015 tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2021 yang dihadiri oleh Deputi Manajemen Puncak BPOM seluruh Kepala Unit Kerja serta Perwakilan Manajemen Representatif Unit Kerja BPOM secara daring. Pada pertemuan *exit meeting*, penyedia jasa konsultansi ISO 9001:2015 dari PT Sucofindo (Persero) menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilans ISO 9001:2015 Tahun 2021 dengan perolehan sertifikat ISO 9001:2015 untuk 102 (seratus dua) unit organisasi yang terdiri dari Manajemen Puncak BPOM, 28 (dua puluh delapan) Unit Kerja Pusat, 33 (tiga puluh tiga) Balai Besar/Balai POM dan 40 (empat puluh) Loka POM.

b. Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 BPOM

Penyelenggaraan Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015 BPOM merupakan evaluasi atas penerapan QMS BPOM yang dilaksanakan secara periodik untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas yang berkelanjutan. Berdasarkan klausul ISO 9001:2015 9.3 Management Review, Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi, pada selang waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keselarasan dengan arah strategis organisasi.

Evaluasi pelaksanaan QMS BPOM tahun 2021 telah dilakukan melalui audit internal dan audit eksternal. Berdasarkan hasil *closing meeting* audit eksternal oleh PT Sucofindo pada tanggal 14 Oktober 2021 seluruh Unit Kerja direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat ISO 9001:2015. Pada kesempatan ini, Kepala BPOM selaku Manajemen Puncak menyerahkan Sertifikat QMS ISO 9001:2015 secara simbolis kepada Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai perwakilan dari unit kerja yang disertifikasi tahun 2021 yang mewakili Barat dan Timur Indonesia.

c. Persiapan Sertifikasi QMS ISO 9001:2015

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2022. Dalam rangka mempersiapkan dokumen mutu untuk 2 (dua) Unit Kerja Pusat yang disertifikasi tahun 2022, dilakukan pendampingan secara daring untuk Unit Kerja Pusat sebanyak 2 (dua) betas kegiatan yaitu:

- Tanggal 9 November 2021 untuk Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
- Tanggal 10 November 2021 untuk Direktorat Siber Obat dan Makanan.
- Tindaklanjut dari hasil pendampingan adalah Unit Kerja Pusat melakukan penyempurnaan dokumen sehingga diharapkan pada saat pelaksanaan audit seluruh dokumen sudah lengkap.

XI. Kerjasama Internasional

Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Badan POM untuk Instituto para A Qualidade de Timor-Leste, I.P (IQTL, I.P.), Republik Demokratik Timor-Leste “Workshop Pengujian Pangan dalam rangka Dukungan Badan POM untuk Perkuatan Pengawasan Pangan di Timor-Leste” di Kupang, 29 November-3 Desember 2021. Badan POM telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dalam kerangka program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) untuk Republik Demokratik Timor-Leste yang berupa “Workshop Pengujian Pangan dalam rangka Dukungan Badan POM untuk Perkuatan Pengawasan Pangan di Timor-Leste” kepada regulator dari Instituto para a Qualidade de Timor-Leste (IQTL, I.P.) pada 29 November-3 Desember 2021 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dan kontribusi Badan POM sebagai regulator di bidang pengawasan obat dan makanan terhadap Program KSS yang menjadi bagian dari Program Prioritas Nasional (ProPN).

Workshop dibuka pada Senin, 29 November 2021 oleh Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan POM, yang menyampaikan bahwa melalui program KSS ini, Badan POM berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada Timor-Leste guna meningkatkan pengawasan pangan di Timor-Leste yang berfokus pada pengujian laboratorium sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pemerintah Timor-Leste.



Program KSS Badan POM kali ini diikuti oleh 6 (enam) peserta dari IQTL, I.P. yang bertujuan untuk perkuatan pengawasan di bidang pengujian pangan, khususnya pengujian garam. Kegiatan ini diselenggarakan selama 5 (lima) hari dalam bentuk Workshop yang terdiri dari penyampaian materi oleh narasumber mengenai Cara Berlaboratorium yang Baik dan Pengenalan Acuan/Metode Pengujian, Teknik Pengambilan Sampel, Sistem Manajemen Mutu: SNI ISO/IEC 17025:2017, Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3), Fortifikasi Pangan dan SNI Garam, Analisis Gravimetri dan Volumetri, serta praktek pengujian di laboratorium Balai POM di Kupang menggunakan sampel garam dari Timor-Leste. Pada pembukaan Workshop juga turut hadir Perwakilan Pemerintah Provinsi NTT, Kepala Biro Kerja Sama dan Humas, Kepala Balai POM di Kupang, perwakilan dari Tim Koordinasi Nasional KSS Indonesia (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan), KBRI Dili, dan unit-unit terkait di Badan POM Pusat serta Balai POM di Kupang, serta narasumber dan peserta KSS.

XII. Sumber Daya Manusia

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2021, jumlah SDM yang dimiliki BPOM untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan adalah sejumlah 4.812 orang. Berdasarkan perhitungan beban kerja Badan POM sampai dengan Tahun 2020-2024, diperoleh data kebutuhan pegawai sesuai dengan analisis beban kerja (ABK) sebanyak 10.009 orang pegawai. Oleh karena itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sebanyak 5.175 orang pegawai pada tahun 2021.

Untuk pemenuhan kebutuhan pegawai, dilakukan analisis beban kerja untuk mengetahui jenis jabatan dan jumlah pegawai yang diperlukan, termasuk *gap* (kekurangan) pegawai. Pengisian *gap* tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pengisian CPNS, PPPK, mutasi dari internal/eksternal, kenaikan jabatan, dan perpanjangan BUP. Salah satu hal yang menjadi perhatian pada saat pelaksanaan reviu ABK adalah tidak semua data pegawai pada aplikasi SIASN adalah data terkini, dan data pendukung untuk proses validasi ABK (seperti data sarana distribusi, produksi, dll) tidak lengkap sehingga menjadi salah satu hambatan dalam memverifikasi usulan ABK dari unit kerja. Maka perlu dilakukan rekonsiliasi data pegawai di lingkungan Badan POM secara berkala.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, telah dilakukan pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, penyesuaian/*inpassing*, pengangkatan kembali dan penyetaraan jabatan sebanyak 548 pegawai, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 28. Grafik Sebaran Jabatan Fungsional BPOM

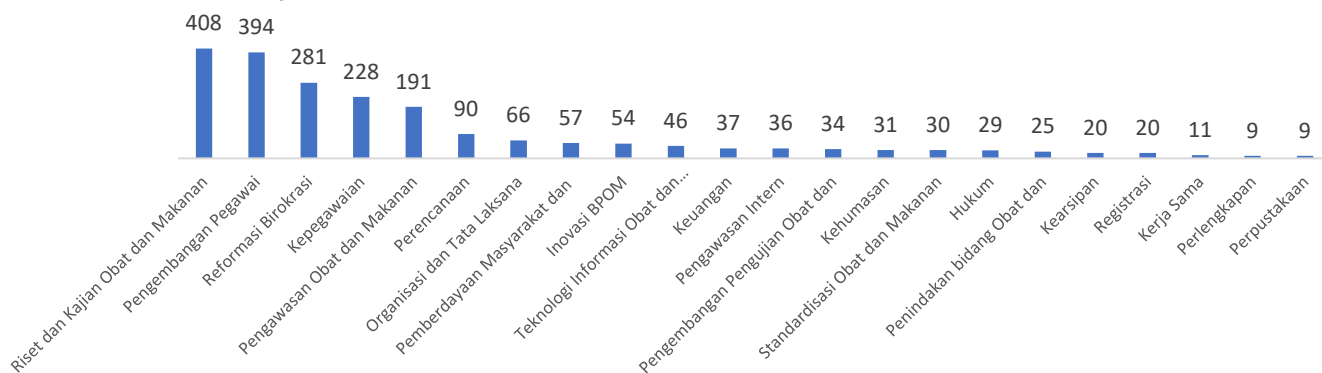
Penegakan Hukuman Disiplin, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan POM sampai dengan triwulan IV 2021 yaitu sebanyak 29 orang pegawai dengan hukuman tingkat ringan 23 orang, hukuman tingkat sedang 3 orang dan hukuman berat 3 orang. Jenis pelanggaran berupa pelanggaran peraturan kedisiplinan, pelanggaran jam kerja, izin perkawinan/ perceraian, ketidakmampuan membimbing bawahan, dan tidak menjunjung harkat dan martabat PNS. Pengembangan aplikasi perencanaan SDM (*sirensdm*) yang bertujuan untuk perhitungan kebutuhan SDM di unit kerja dan rencana pemenuhan kebutuhan SDM yang terintegrasi dengan aplikasi SIASN.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Aplikasi IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*) merupakan *platform* pengembangan kompetensi digital terintegrasi di BPOM. Aplikasi IDEAS BPOM dalam mengembangkan kompetensi pegawai memiliki fitur *online shopping training* atau pelatihan tidak terjadwal yaitu fitur yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara *online* kapanpun dan dimanapun dengan memanfaatkan modul materi di aplikasi IDEAS. Fitur lain yang dimiliki aplikasi IDEAS BPOM adalah webinar/diskusi *online* yang dapat diikuti oleh pegawai BPOM dengan narasumber yang berasal dari internal BPOM maupun eksternal. Aplikasi IDEAS BPOM juga memiliki keunggulan berupa penerbitan sertifikat *online* dimana semua data pengembangan kompetensi pada IDEAS terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id>.

Sampai bulan Desember 2021, Aplikasi IDEAS BPOM sudah digunakan pegawai BPOM untuk kegiatan pengembangan kompetensi dengan jumlah pegawai yang dikembangkan kompetensinya sebanyak 9.730 peserta pelatihan tidak terjadwal dan 6.689 peserta webinar/diskusi *online*. Peserta yang lulus pelatihan tidak terjadwal sebanyak 5.130 peserta sedangkan peserta yang lulus webinar/diskusi *online* sebanyak 5.977 peserta. Rata-rata nilai *post test* yang diperoleh peserta yaitu 77,76 untuk pelatihan tidak terjadwal dan 73,29 untuk webinar/diskusi *online*.

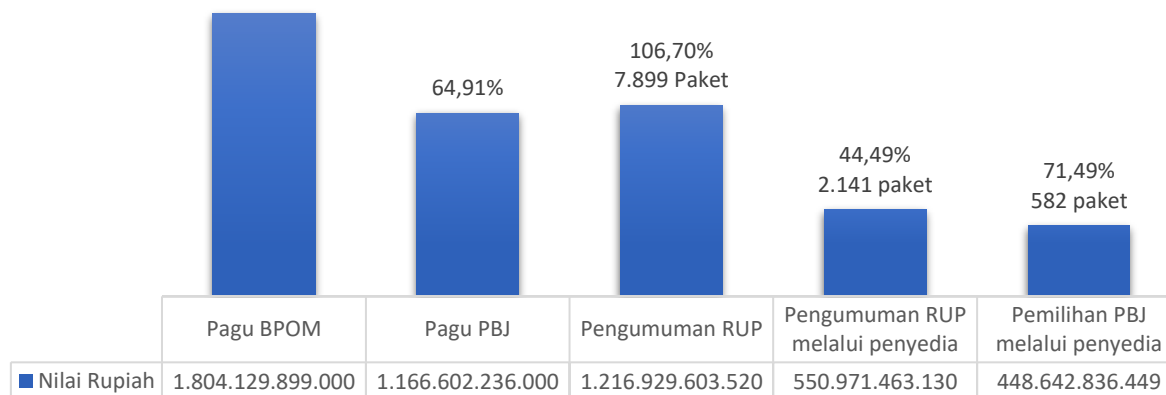
Aplikasi SIMPHONI merupakan *platform knowledge management* di lingkungan BPOM. Aplikasi SIMPHONI BPOM memungkinkan pegawai atau Unit BPOM untuk *sharing* data, informasi, dan pengetahuan ke pegawai atau Unit lain. Sampai dengan bulan Desember 2021, sebanyak 2.016 data/informasi/pengetahuan telah dikelola dalam aplikasi. Pengetahuan yang telah dipublikasikan pada aplikasi SIMPHONI BPOM memiliki berbagai macam fungsi pengetahuan. Fungsi pengetahuan dengan jumlah publikasi paling banyak yaitu Riset dan Kajian Obat dan Makanan dengan jumlah publikasi 408 sedangkan fungsi pengetahuan dengan jumlah publikasi paling sedikit yaitu perpustakaan dengan jumlah publikasi 9.



Gambar 29. Data/Informasi/Pengetahuan yang diunggah dalam aplikasi berdasarkan kategori/ Fungsi

XIII. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Pada tahun 2021, total pagu belanja pengadaan barang dan jasa (PBJ) BPOM (Pagu Belanja Barang dan Belanja Modal) sebesar Rp1.166.602.236.000,- atau 64,66% dari total anggaran Badan POM (Rp1.804.129.899.000). Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, RUP Terumumkan untuk 7.665 paket senilai Rp 1.216.929.603.520,- atau sebesar 104,31% dari total Belanja Pengadaan (Rp 1.166.602.236.000,-). RUP Terumumkan berlebih dapat disebabkan oleh RUP yang tidak dapat direvisi karena terafiliasi dengan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah dilaksanakan serta belum seluruh Satker melakukan penyesuaian pagu belanja pengadaan sebagai dampak penghematan anggaran Tahun 2021. Dalam Rencana Umum Pengadaan BPOM TA 2021, terdapat RUP melalui Penyedia sejumlah 2.322 paket senilai Rp550.971.463.130,- atau sebesar 45,28% dari total RUP yang diumumkan yang merupakan rencana pelaksanaan barang/jasa melalui pemilihan penyedia. Progress pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 1.130 paket dengan nilai Rp448.642.836.449,- atau 81,43% dibandingkan RUP melalui Penyedia Rp550.971.463.130,-. Realisasi Anggaran Belanja Pengadaan sampai dengan 31 Desember TA 2021 sebesar **Rp 1.155.528.136.220,-** atau **99,05%** dari pagu belanja pengadaan.



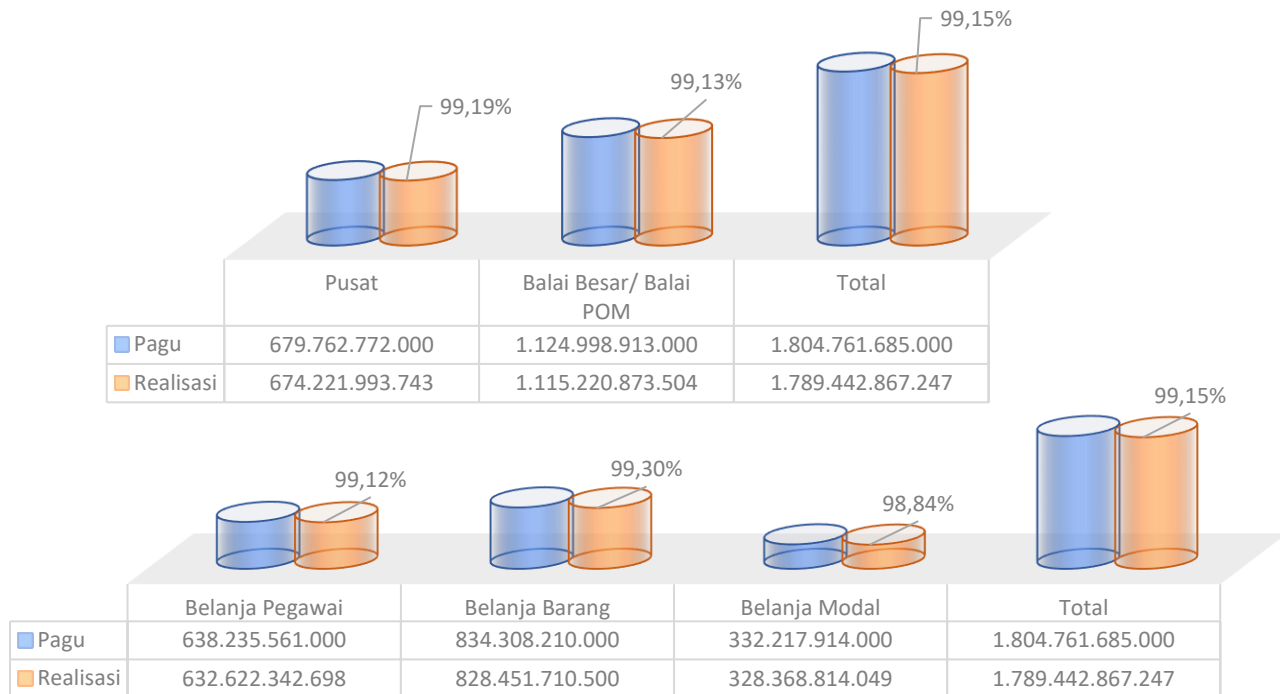
XIV. Pengelolaan anggaran

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, estimasi penerimaan negara BPOM yang berasal dari PNBP sebesar Rp168.717.660.000,- yang terdiri dari PNBP fungsional sebesar Rp168.717.660.000,- dan PNBP umum sebesar Rp4.754.583.897,-. Dari jumlah tersebut, realisasi PNBP yang dapat dicapai adalah Rp222.203.319.250,- atau 131,70% dari target yang ditetapkan. Sedangkan, estimasi penggunaannya adalah Rp92.690.213.000,- dengan realisasi penggunaan PNBP mencapai Rp92.005.752.009,- atau 99,26%.

2. Realisasi Anggaran

Total anggaran BPOM Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.034.185.860.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 30 Satker Pusat, 33 Balai Besar/Balai POM dan 15 Loka Satker Mandiri. Realisasi anggaran Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp1.139.143.358.967,- (63.14%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk 30 Satker Pusat Rp425.552.658.524,- dan realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp673.752.745.317,-, dan realisasi anggaran untuk Loka Satker Mandiri sebesar Rp39.837.955.126,-.



PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2021-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta *continuous improvement*.

LAMPIRAN I

CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengawasan Obat	88	Indeks	85,64	97,32
		Indeks Pengawasan Obat Tradisional	84	Indeks	85,11	101,32
		Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan		Indeks	85,26	101,50
		Indeks Pengawasan Kosmetik		Indeks	85,15	101,37
		Indeks Pengawasan Makanan	81	Indeks	78,15	96,48
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	67	%	54,32	81,07
1.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	83,6	%	86,41	103,36
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	80	%	86,24	107,80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	87,5	%	83,16	95,04
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	76,5	%	80,81	105,63
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88	%	78,96	89,73
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	79	Nilai	76,6	96,96
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	89	Nilai	87,77	98,62
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	74	Nilai	68,7	92,84
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	88,46	Nilai	90,9	102,76
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	89	%	94,42	106,09
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	60	%	60,42	100,70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	88	%	98,28	111,68
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	55	%	55,25	100,45

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	63	%	72,9	115,71
		Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4,16	Indeks	4,3	103,37
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	92	Nilai	93,37	101,49
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	1.330	Sekolah	1359	102,18
		Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	427	Desa	427	100,00
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	165	Pasar	169	102,42
		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	%	91,77	107,96
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77	%	93,14	120,96
		Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	69	%	91,96	133,28
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	%	74,31	97,78
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	80	%	83	103,75
		Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	75	%	74,00	98,67
		Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	85	%	89,00	104,71
		Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	90	%	100	111,11
		Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	79,9	Indeks	79,94	100,05
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal	84	Indeks	85,6	101,90
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	2	Indeks	1,75	87,50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	89	%	100	112,36
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	78	%	58,62	75,15
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	77	%	87,4	113,51
		Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	77	%	78,94	102,52

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase laporan informasi dan laporan intelijen UPT yang sesuai pedoman	50	%	51,07	102,14
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	3	Jaringan	3	100,00
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	79,8	Indeks	79,84	100,05
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	83	Indeks	85,18	102,63
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	2	Indeks	2	100,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen	100	%	75	75,00
1.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase sarana Produksi Obat Tradisional yang memenuhi persyaratan CPOTB	80	%	82,81	103,51
		Persentase iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	75	%	77,8	103,73
		Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh Balai/ Balai Besar POM	82	%	100	121,95
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	87	Indeks	88,24	101,43
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	76	%	78,81	103,70
		Persentase hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti	74	%	81,01	109,47
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	%	96,02	103,25
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	61	%	71,43	117,10
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	89	%	91,32	102,61
		Indeks Pelayanan Publik dibidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,35	Indeks	4,14	95,17
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	83	Indeks	82,95	99,94
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	82,5	Indeks	86,43	104,76
		Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang optimal	2	Indeks	1,00	50,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99	%	100	101,01
1.5	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko	38	%	35	92,11
		Persentase peningkatan industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	10	%	10,96	109,60
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	51	%	59,62	116,90
		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan Oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	71	%	75,34	106,11
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	84	Indeks	87,5	104,17
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	87	%	91,19	104,82
		Persentase Koordinasi pengawasan produksi pangan fortifikasi yang dilaksanakan	70	%	70	100,00
		Persentase Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha dan masyarakat Terhadap Pengawasan produksi yang Diberikan	83	%	92,24	111,13
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar	100	Kab/Kota	114	114,00
		Persentase Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	87	%	91,67	105,37
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,2	Indeks	4,44	105,71
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	86	Indeks	86	100,00
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	84,75	Indeks	85,61	101,01
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	2	Indeks	1,75	87,50
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang baik	90	%	100	111,11
1.6	Pengawasan Kosmetik	Persentase Sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	86	%	81,06	94,26
		Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	86	%	72,15	83,90
		Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	84	%	84,93	101,11

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	84	Indeks	84,83	100,99
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu	86	%	84,32	98,05
		Persentase Hasil Pengawasan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku usaha/Stakeholder	82	%	81,62	99,54
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	89	%	84,85	95,34
		Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	81	%	114,29	141,10
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	91	%	98,39	108,12
		Indeks Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik	4,4	Indeks	4,36	99,09
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	80	Indeks	80,27	100,34
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	81	Indeks	87,22	107,68
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	2	Indeks	0,75	37,50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100	%	100	100,00
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	75	%	80,36	80,36
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di Bidang Distribusi Obat	89	Indeks	90,26	90,26
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	81	%	82,73	82,73
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai	79	%	84,53	107,00
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	80	%	93,76	117,20
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,01	Indeks	4,08	101,75
		Indek RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	91	Indeks	83,66	91,93
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	77	Indeks	84,73	110,04
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang optimal	2	Indeks	1	50,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	88	%	104,9	119,20
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	87	Indeks	90,23	102,53
		Indeks kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan obat dan NPP	84,7	Indeks	93,2	105,91
		Indeks Kepatuhan industri Produk Tembakau dalam iklan dan label	47	Indeks	53,62	60,93
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	72	%	69,79	96,93
		Jumlah permohonan ekspor impor Obat dan NPP yang diselesaikan tepat waktu	18.000	Permohonan	20499	113,88
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4,45	Indeks	4,52	101,57
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang obat	90,77	Nilai	93,75	103,28
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	70	%	75,38	107,69
		Persentase laporan pengawasan mutu, label dan iklan obat dan NPP yang ditindaklanjuti	86	%	80,03	93,06
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60.200	Label dan Iklan	71.627	118,98
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	87,4	Indeks	87,42	100,02
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	78	Indeks	87,71	112,45
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	2	Indeks	1	50,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	98	%	100	102,04
1.9	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	65	%	68,39	105,22
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pengawasan sesuai standar	67	%	67	100,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah sarana peredaran yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan	160	sarana	158	98,75
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	84	indeks	91,08	108,43
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan post market sesuai standar	100	Kab/Kota	107	107,00
		Persentase keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	%	94,36	100,38
		Persentase pelaku usaha dan masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap implementasi peraturan peredaran pangan olahan yang baik	80	%	84,97	106,21
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,45	Indeks	4,51	101,35
		Jumlah permohonan ekspor/impor yang diselesaikan tepat waktu	65000	Permohonan	62836	96,67
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	84,5	Indeks	84,5	100,00
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86,75	Indeks	87,05	100,35
		Indeks pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang baik	2	Indeks	2	100,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang baik	92	%	100	108,70
1.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase sarana produksi obat yang mandiri dalam pemenuhan CPOB	55	%	65,79	119,62
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi	87	Indeks	88,27	101,46
		Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku, dan obat high risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	74	%	77,19	104,31
		Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil Pengawasan sarana produksi di Balai	95	%	100,00	105,26
		Persentase produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	86	%	88,24	102,60
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	74	%	74,24	100,32
		Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	70	%	70,75	101,07
		Indeks Pelayanan Publik	3,76	Indeks	4,26	113,30

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat inovasi atau obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawalan inovasi pengembangan obat	65	%	72,22	111,11
		Nilai RB Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	89	Indeks	87,78	98,63
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	77	Indeks	85,85	111,49
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP yang optimal	2	Indeks	1,75	87,50
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	95	%	100	105,26
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	81	%	85,28	105,28
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	84	Indeks	84,09	100,11
		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	79	%	84,17	106,54
		Persentase hasil penilaian registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	%	99,64	104,88
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,6	Indeks	4,63	100,65
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	93	%	94,48	101,59
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	97,7	Indeks	90,46	92,59
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	79	Indeks	87,3	110,51
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	2	Indeks	2,75	137,50
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	97	%	100	103,09
1.12	Registrasi Obat	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	73	%	85,17	116,67
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi Obat	85	Indeks	88,54	104,16
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	66	%	71,21	107,89
		Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	73	%	80,54	110,33
		Persentase pengaduan/kekhawatiran/masukan terkait registrasi Obat yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat	3,76	Indeks	3,99	106,12

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	81	%	57,14	70,54
		Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100	%	100	100,00
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	90	Indeks	85,92	95,47
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	77	Indeks	89,21	115,86
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	2	Indeks	0,75	37,50
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	93	%	100	107,53
1.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	93	%	94,31	101,41
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Pratinlaya/Klinik dan DIP	83	Indeks	84,69	102,04
		Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pratinlaya/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	82	%	88,21	107,57
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pratinlaya/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	73	%	91,96	125,97
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,35	Indeks	4,07	93,56
		Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	82	%	81,47	99,35
		Persentase pendampingan di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Pratinlaya/Klinik dan DIP yang efektif	76	%	81,42	107,13
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	82	%	82,92	101,12
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	84,7	Indeks	84,33	99,56
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	86	Indeks	87,03	101,20
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik yang baik	2	%	2,5	125,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	96	%	99,99	104,16
1.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88	Indeks	87,35	99,26
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai Roadmap	90	%	114	126,67
		Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibandingkan dengan yang direncanakan	90	%	100	111,11
		Persentase sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	90	%	135	150,00
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90	%	97,6	108,44
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82	Indeks	84,56	103,12
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79	Indeks	75,61	95,71
		Indeks pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang baik di Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,75	Indeks	2,75	100,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	%	100	100,00
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	86	Indeks	69,08	80,33
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	84	Indeks	89,29	106,30
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Pangan Olahan sesuai roadmap	100	%	100	100,00
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	92	%	94,44	102,65
		Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	88	%	89,52	101,73
		Persentase inovasi makanan yang difasilitasi melalui standar	80	%	85	106,25

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	87	%	98,23	112,91
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4,35	Indeks	4,43	101,84
		Indeks reformasi birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	87,4	Indeks	87,39	99,99
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86	Indeks	87,95	102,27
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	2	Indeks	3	150,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100	%	100	100,00
		1.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	89,6	Indeks
Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif sesuai roadmap	83			%	100	120,48
Persentase standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	86			%	100	116,28
Persentase sosialisasi standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif kepada stakeholder yang efektif	88			%	87,48	99,41
Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	85,3			Indeks	85,33	100,04
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	81			Indeks	88,43	109,17
Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang optimal	2			Indeks	1,75	87,50
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	100			%	100	100,00
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan			Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	40	%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	86	Indeks	88,01	102,34
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRT	32	%	34	106,25
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah	160	Kab/Kota	160	100,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	82	%	88,64	108,10
		Jumlah pelaku UMK Makanan yang diintervensi keamanan pangan	18000	UMK	21600	120,00
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	3,46	Indeks	3,61	104,34
		Jumlah pemda yang diintervensi keamanan pangan	203	Pemda	238	117,24
		Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan	300	Kader/fasilitator	318	106,00
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	89,37	Indeks	91,5	102,38
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai Pedoman	82	%	100	121,95
		Indeks RB Dit PMPU	90	Indeks	89,57	99,52
		Indeks Profesionalitas ASN Dit PMPU	77	Indeks	85,94	111,61
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU	2	Indeks	2,25	112,50
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Dit PMPU	91	%	100	109,89
1.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian	76	%	76,77	101,01
		Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM	5	%	5	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	90	Indeks	92,66	102,96
		Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar GLP	75	%	87,88	117,17
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	74	%	75,18	101,59
		Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	76,56	%	76,82	100,34
		Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	82	%	76,02	92,71
		Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	%	96,7	105,11
		Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,2	Indeks	4,34	103,33
		Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	50	%	50	100,00
		Indeks RB PPPOMN	86,6	Indeks	86,58	99,98
		Nilai AKIP PPPOMN	77,2	Nilai	80,22	103,91
		Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86	Indeks	85,02	98,86

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2	Indeks	1,75	87,50
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	93,5	nilai	92,3	98,72
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	91	%	100	109,89
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	52	%	87,59	168,44
		Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM	76	%	96,96	127,58
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti	75	%	66,67	88,89
		Persentase perkara di UPT BPOM yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis	47	%	44,82	95,36
		Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi SPDP	55	%	50	90,91
		Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar	55	%	64,12	116,58
		Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	61,3	Indeks	65,2	106,36
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	83	Indeks	85,71	103,27
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang optimal	2	Indeks	0,75	37,50
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	89	%	100	112,36
1.20	Riset dan kajian di bidang obat dan makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	75	%	78,66	104,88
		Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100	%	100	100,00
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian dan kesesuaian dengan timeline	84	%	91,75	109,23
		Nilai kualitas publikasi hasil riset dan kajian	75	Nilai	70,37	93,83
		Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	81,7	Indeks	81,74	100,05
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	76,6	Nilai	75,1	98,04
		Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	86,5	Nilai	87	100,58
		Indeks pengelolaan data dan informasi PRKOM yang optimal	2	Indeks	2,5	125,00
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	90,7	nilai	88,96	98,08

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	93	%	96,67	103,95
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	80	%	80	100,00
		Persentase Pemda yang menerapkan program keamanan OT, SK dan Kos	45	%	45	100,00
		Persentase duta yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat	82	%	82	100,00
		Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK	73	%	73	100,00
		Persentase UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar	87	%	102	117,24
		Persentase Pemda yang diintervensi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	45	%	45	100,00
		Persentase UMKM Kosmetik yang memenuhi standar	70	%	70	100,00
		Jumlah komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	40	Komunitas	42	105,00
		Tingkat efektivitas KIE Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	92,34	%	90,24	97,73
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3,57	Indeks	3,57	100,00
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	80	Nilai	75	93,75
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	77	Indeks	83	107,79
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang optimal	2	Indeks	1	50,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	99	%	100	101,01

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.22	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80	%	81,48	101,85
		Persentase hasil patroli siber yang ditindaklanjuti	75	%	74,98	99,97
		Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	80	%	81,6	102,00
		Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang Dimanfaatkan	85	%	87,85	103,35
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	73,7	Indeks	Tidak dapat dinilai karena unit kerja baru dibentuk per September 2020	Tidak dapat dinilai karena unit kerja baru dibentuk per September 2020
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Siber Obat dan Makanan	86,5	Indeks	81,81	94,58
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang optimal	2	Indeks	0,5	25,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	88	%	75	85,23
2	Program Dukungan Manajemen	Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	32,03	Nilai	30,83 (merupakan capaian tahun 2020, karena hasil penilaian tahun 2021 belum keluar dari KemenPAN-RB)	96,25
		Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	72,44	Nilai	70,67 (merupakan capaian tahun 2020, karena hasil penilaian tahun 2021 belum keluar dari KemenPAN-RB)	97,56
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Nilai	WTP	100,00
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	Nilai	93,98	101,05
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	87	Indeks	93,38	107,33
		Indeks Kepuasan Media	74	Indeks	76,64	103,57
		Indeks Opini Publik BPOM	78	Indeks	82,55	105,83
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,7	Indeks	3,5	94,59
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan	100	%	100	100,00
		Nilai Pengelolaan BMN	80	Nilai	89	111,25
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	56	Indeks	56	100,00
		Indeks Sistem Merit	Level 4 (0,88)	Indeks	0,88	100,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	%	100	100,00
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	%	100	100,00
		Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	%	100	100,00
		Persentase Advokasi Hukum yang efektif	95,5	%	95,97	100,49
		Persentase kerja sama yang efektif	84	%	88,76	105,67
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,82	%	99,82	100,00
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	65	%	65,91	101,40
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,2	%	99,44	100,24
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	92,52	Nilai	93,71	101,29
		Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	4,51	Indeks	4,59	101,77
		Indeks RB Sekretariat Utama	79,5	Indeks	79,47	99,96
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	83	Nilai	81,2	97,83
		Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	79,6	Indeks	83,41	104,79
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	2	Indeks	1,2	60,00
		Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93	Nilai	88,75	95,43
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	100	%	75	75,00
2.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional, dan Multilateral	84	%	89,02	105,98
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan	84	%	88,49	105,35
		Indeks kepuasan media	74	Indeks	76,64	103,57
		Indeks opini publik BPOM	78	Indeks	82,55	105,83
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerjasama dan Humas	3,84	Indeks	3,84	100,00
		Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	82	%	86,4	105,37
		Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	1	Negara	1	100,00
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,82	%	99,82	100,00
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	65	%	65,91	101,40

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	80	%	87,01	108,76
		Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	75	Indeks	75,04	100,05
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	81	Indeks	84,19	103,94
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas	2	Indeks	1,25	62,50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	90	%	100	111,11
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan akuntabilitas	4,22	Nilai	3,96	93,84
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	72,44	Nilai	70,67	97,56
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	94	Nilai	91,36	97,19
		Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPOM	94,87	Nilai	95,72	100,90
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan yang disusun dengan Standara Akuntansi Pemerintahan	100	%	100	100,00
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3,8	Indeks	3,2	84,21
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan Kinerja, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Satker Terhadap Pedoman	75,43	%	71	94,13
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan Kinerja, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan BPOM yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar	100	%	99	99,00
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan Kinerja, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Utama yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar	100	%	98	98,00
		Tingkat Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	83	%	84,41	101,70
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	72,2	Indeks	72,2	100,00
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	81	Indeks	85,18	105,16
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik	2	Indeks	2,5	125,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	Nilai	100	100,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	4,38	Nilai	4,25	97,03
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	7,39	Nilai	7,37	99,73
		Nilai RB BPOM penataan tata laksana	5,24	Nilai	5	95,42
		Nilai RB BPOM peningkatan kualitas pelayanan publik	5,67	Nilai	5,58	98,41
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	87	Indeks	93,38	107,33
		Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	3,7	Indeks	3,74	101,08
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	%	100	100,00
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	%	100	100,00
		Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	%	100	100,00
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100	%	100	100,00
		Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang Selesai Ditindaklanjuti	99,2	%	99,44	100,24
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang Dilaksanakan	92,52	Indeks	93,71	101,29
		Indeks Pelayanan Publik	4,51	Indeks	4,59	101,77
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	85,8	Indeks	85,82	100,02
		Indeks Profesionalitas ASN	84	Indeks	86,2	102,62
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	2	%	1	50,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	95,2	Nilai	94	98,74
2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	5,13	Nilai	4,67	91,03
		Indeks Sistem Merit	0,88	Indeks	0,88	100,00
		Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Biro SDM	3,41	Indeks	3,41	100,00
		Persentase ASN BPOM yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	74	Indeks	74,42	100,57
		Persentase ASN BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	99	%	99,89	100,90
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3,05	Indeks	3,05	100,00
		Persentase ABK yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Ketentuan	70	%	77	110,00
		Persentase Data ASN yang Dimutakhirkan	80	%	83	103,75
		Indeks RB Biro SDM	82,5	Indeks	82,54	100,05

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks profesionalitas ASN di Sekretariat Utama	78	Indeks	84,71	108,60
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro SDM yang optimal	2	Indeks	1	50,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100	Indeks	100	100,00
2.5	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Persentase SDM POM yang memenuhi Standar Kompetensi	77	%	79,65	103,44
		Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai Standar	655	SDM	716	109,31
		Nilai RB Badan POM Manajemen Perubahan	4,3	Nilai	4,56	106,05
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	45	%	61	135,56
		Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti	12	Kerja Sama	12	100,00
		Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4,4	Nilai	4,6	104,55
		Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi	91	%	99	108,79
		Persentase realisasi rencana aksi RB Badan POM terkait Manajemen Perubahan	87	%	87	100,00
		Indeks RB PPSDM POM	90	Nilai	85,34	94,82
		Nilai AKIP PPSDM POM	83	Nilai	75,09	90,47
		Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	77	Nilai	81,89	106,35
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	2	Indeks	1	50,00
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	94	Nilai	90,9	96,70
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM	92	Nilai	100	108,70
2.6	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks SPBE Badan POM	2,57	Indeks	2,91	113,23
		Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM	100	%	100	100,00
		Indeks Kepuasan Layanan TIK	2,9	%	3,32	114,48
		Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	95	%	97,87	103,02
		Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	23	%	23	100,00
		Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	48	%	48	100,00
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100	%	100	100,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	79,2	Indeks	78,18	98,71
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	81,9	Nilai	79,42	96,97
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	77	Indeks	78,72	102,23
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	2	Indeks	2,25	112,50
		Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, dan Data	25	%	26,37	105,48
		Sertifikasi ISO 27001	1	Sertifikat	1	100,00
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	93	Nilai	87,07	93,62
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	89	Nilai	100	112,36
2.7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5,98	Nilai	5,94	99,33
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja lingkup BPOM	8,56	Nilai	8,35	97,55
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mitra kerja Inspektorat I	3	Level	3	100,00
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi mitra kerja Inspektorat I	0,99	%	0,014	101,00
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	92,5	%	94,24	101,88
		Indeks Kepuasan mitra pengawasan intern	85,5	Indeks	89,12	104,23
		Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern di wilayah mitra Inspektorat I	86,5	Indeks	86,45	99,94
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100	%	122,22	122,22
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern	75	Nilai	74,99	99,99
		Persentase rekomendasi Pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	93	%	84,95	91,34
		Indeks pengaduan lingkup Inspektorat I yang ditindaklanjuti dengan tuntas	100	Indeks	100	100,00
		Level kapabilitas APIP	3	Level	3	100,00
		Persentase rekomendasi survei kepuasan masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	80	%	100	125,00
		Persentase permintaan layanan konsultasi mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	%	100	108,70
		Indeks RB Inspektorat I	80,6	Indeks	77,04	95,58
		Indeks Profesionalisme ASN Inspektorat I	84,28	Indeks	86,54	102,68

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	2	Indeks	1	50,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	89	%	75	84,27
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	5,98	Nilai	5,94	99,33
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,56	Nilai	8,35	97,55
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mitra kerja Inspektorat II	3	Level	3	100,00
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup mitra kerja Inspektorat II	0,99	%	0,02	100,98
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	85,5	Indeks	87,94	102,85
		Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,5	Indeks	84,91	98,16
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100	%	100	100,00
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern	75	Nilai	74,99	99,99
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	93	%	98,31	105,71
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti dengan tuntas	100	%	100	100,00
		Persentase permintaan layanan konsultasi mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	%	87,91	95,55
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	100	%	50	50,00
		Persentase rekomendasi hasil reuiv PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II	100	%	71,5	71,50
		Level Kapabilitas APIP	3	Level	3	100,00
		Indeks RB Inspektorat II	84,1	Indeks	84,14	100,05
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	85,75	Indeks	85,54	99,76
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2	Indeks	1	50,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	89	%	75	84,27
2.9	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	90	Nilai	94,22	104,69
		Nilai Pengelolaan BMN BPOM	80	Nilai	89	111,25
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	56	Indeks	56	100,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3,73	Indeks	3,3	88,47
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Standar	97	%	95	97,94
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	87	%	96	110,34
		Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	91	%	81	89,01
		Persentase Satker yang mengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai Perencanaan	90	Level	90	100,00
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	75	%	87,67	116,89
		Indeks RB Biro Umum	82,2	Indeks	81,81	99,53
		Indeks profesionalitas ASN Biro Umum	74	Indeks	79,21	107,04
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	2	Indeks	0,25	12,50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	100	%	75	75,00

LAMPIRAN II

SERAPAN ANGGARAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN SAMPAI DENGAN
TRIWULAN IV TAHUN 2021
SUMBER: APLIKASI OMSPAN
(Per 31 DESEMBER 2021)

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1	Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan	334.423.477.000	330.684.930.497	98,8821%
1.1	Biro Kerjasama	9.122.289.000	9.087.148.865	99,6148%
1.2	Biro Perencanaan Dan Keuangan	13.859.474.000	13.771.930.972	99,3684%
1.3	Biro Hukum Dan Organisasi	9.510.253.000	9.446.096.216	99,3254%
1.4	Biro Umum	294.566.830.000	291.148.251.400	98,8395%
1.5	Biro Sumber Daya Manusia	7.364.631.000	7.231.503.044	98,1923%
2	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif	35.752.556.000	35.695.042.210	99,8391%
2.1	Dit. Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor	6.137.138.000	6.119.722.104	99,7162%
2.2	Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif	7.480.765.000	7.476.944.507	99,9489%
2.3	Dit. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor	6.624.229.000	6.609.591.342	99,7790%
2.4	Dit. Registrasi Obat	8.210.000.000	8.197.568.553	99,8486%
2.5	Dit. Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif	7.300.424.000	7.291.215.704	99,8739%
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	34.359.264.000	34.357.666.889	99,9954%
3.1	Dit. Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	7.955.749.000	7.955.535.832	99,9973%
3.2	Dit. Pengawasan Kosmetik	6.341.990.000	6.341.708.637	99,9956%
3.3	Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik	7.237.542.000	7.236.579.859	99,9867%
3.4	Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik	5.169.863.000	5.169.855.193	99,9998%
3.5	Dit. Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	7.654.120.000	7.653.987.368	99,9983%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
4	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	42.573.292.000	42.464.645.177	99,7448%
4.1	Dit. Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	9.929.701.000	9.923.513.949	99,9377%
4.2	Dit. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	9.127.146.000	9.037.573.995	99,0186%
4.3	Dit. Registrasi Pangan Olahan	6.781.527.000	6.778.148.814	99,9502%
4.4	Dit. Standrdisasi Pangan Olahan	7.012.347.000	7.004.000.244	99,8810%
4.5	Dit. Pengawasan Produksi Pangan Olahan	9.722.571.000	9.721.408.175	99,9880%
5	Deputi Bidang Penindakan	24.731.273.000	24.725.430.945	99,9764%
5.1	Dit. Siber Obat Dan Makanan	4.043.710.000	4.040.894.986	99,9304%
5.2	Dit. Intelijen Obat Dan Makanan	6.903.694.000	6.902.719.910	99,9859%
5.3	Dit. Penyidikan Obat Dan Makanan	6.928.087.000	6.926.254.103	99,9735%
5.4	Dit. Cegah Tangkal	6.855.782.000	6.855.561.946	99,9968%
6	Inspektorat Utama	20.095.728.000	20.076.001.498	99,9018%
6.1	Inspektorat I	15.947.246.000	15.928.497.328	99,8824%
6.2	Inspektorat II	4.148.482.000	4.147.504.170	99,9764%
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	89.006.119.000	88.351.992.800	99,2651%
8	Pusat Riset Dan Kajian Obat dan Makanan	16.546.638.000	15.927.024.512	96,2554%
9	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	41.043.220.000	41.018.389.176	99,9395%
10	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan	41.231.205.000	40.920.870.039	99,2473%
TOTAL SATKER PUSAT		679.762.772.000	674.221.993.743	99,1849%

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	Persen Realisasi Anggaran
1	MAMUJU	19.269.583.000	19.262.178.083	99,962%
2	SURABAYA	45.856.819.000	45.834.343.279	99,951%
3	SEMARANG	46.459.983.000	46.428.518.765	99,932%
4	PALEMBANG	31.772.128.000	31.749.335.312	99,928%
5	SAMARINDA	41.031.751.000	40.975.560.327	99,863%
6	PEKAN BARU	33.184.927.000	33.136.916.695	99,855%
7	MATARAM	27.005.026.000	26.962.810.767	99,844%
8	MANOKWARI	24.079.803.000	24.036.354.533	99,820%
9	KUPANG	27.919.789.000	27.856.172.218	99,772%
10	SOFIFI	14.207.826.000	14.175.366.081	99,772%
11	PALANGKARAYA	23.676.205.000	23.620.685.674	99,766%
12	BENGKULU	27.510.950.000	27.436.520.659	99,729%
13	JAKARTA	41.686.698.000	41.538.323.342	99,644%
14	PONTIANAK	28.611.346.000	28.507.345.228	99,637%
15	AMBON	21.251.466.000	21.165.878.150	99,597%
16	KENDARI	20.578.241.000	20.492.525.226	99,583%
17	BANDUNG	50.490.769.000	50.258.696.474	99,540%
18	BANDA ACEH	34.781.626.000	34.599.526.808	99,476%
19	JAYAPURA	32.443.548.000	32.239.696.398	99,372%
20	PADANG	41.448.152.000	41.168.302.154	99,325%
21	PANGKAL PINANG	20.455.851.000	20.317.505.547	99,324%
22	PALU	28.119.862.000	27.918.906.260	99,285%
23	BANDAR LAMPUNG	27.498.670.000	27.292.678.001	99,251%
24	SERANG	29.597.480.000	29.364.772.030	99,214%
25	YOGYAKARTA	35.259.957.000	34.967.548.607	99,171%
26	MEDAN	48.866.724.000	48.448.361.995	99,144%
27	MAKASSAR	43.164.452.000	42.780.472.985	99,110%
28	DENPASAR	43.636.626.000	43.086.682.024	98,740%
29	GORONTALO	18.722.057.000	18.450.315.775	98,549%
30	BATAM	25.980.907.000	25.578.945.156	98,453%
31	MANADO	37.118.495.000	36.361.884.875	97,962%
32	JAMBI	27.935.911.000	26.951.746.018	96,477%
33	BANJARMASIN	47.356.942.000	44.696.149.310	94,381%
TOTAL SATKER BALAI		1.066.980.570.000	1.057.661.024.756	99,127%

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	Persen Realisasi Anggaran
1	KOTA PALOPO	3.805.738.000	3.801.275.667	99,883%
2	KOTA TARAKAN	5.751.400.000	5.740.568.304	99,812%
3	KABUPATEN JEMBER	3.097.021.000	3.085.307.230	99,622%
4	KABUPATEN BANYUMAS	4.007.520.000	3.986.923.231	99,486%
5	KOTA TASIKMALAYA	4.017.175.000	3.994.368.791	99,432%
6	KABUPATEN KEDIRI	3.190.165.000	3.171.370.302	99,411%
7	KOTA LUBUKLINGGAU	3.033.414.000	3.012.949.248	99,325%
8	KABUPATEN ENDE	4.119.229.000	4.085.488.156	99,181%
9	KOTA SURAKARTA	4.696.612.000	4.655.521.540	99,125%
10	KABUPATEN TANGERANG	3.921.976.000	3.885.223.073	99,063%
11	KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	3.876.795.000	3.838.831.431	99,021%
12	KABUPATEN BOGOR	3.762.678.000	3.720.868.135	98,889%
13	KABUPATEN MIMIKA	3.420.771.000	3.382.650.924	98,886%
14	KOTA BAUBAU	3.677.156.000	3.623.000.953	98,527%
15	KOTA DUMAI	3.640.693.000	3.575.501.763	98,209%
TOTAL SATKER LOKA SATKER MANDIRI		58.018.343.000	57.559.848.748	99,210%

LAMPIRAN III

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
FUNGSIONAL
(Per 31 DESEMBER 2021)

NO	NAMA SATUAN KERJA	NILAI
1	Balai Besar Pom di Bandar Lampung	504.410.000
2	Balai Besar Pom Serang	148.060.000
3	Balai Besar Pom di Dki Jakarta	19.160.000
4	Balai Besar Pom di Bandung	543.970.000
5	Balai Besar Pom di Semarang	913.650.000
6	Balai Besar Pom di Yogyakarta	312.350.000
7	Balai Besar Pom di Surabaya	2.269.160.000
8	Balai Besar Pom di Pontianak	828.100.000
9	Balai Besar Pom Palangkaraya	671.330.000
10	Balai Besar Pom di Banjarmasin	1.005.560.000
11	Balai Besar Pom di Samarinda	591.820.000
12	Balai Pom di Gorontalo	217.640.000
13	Balai Besar Pom di Manado	275.870.000
14	Balai Pom di Palu	377.665.000
15	Balai Besar Pom di Makassar	408.885.000
16	Balai Pom di Kendari	417.475.000
17	Balai Besar Pom di Denpasar	415.025.000
18	Balai Besar Pom di Mataram	1.299.390.000
19	Balai Pom di Kupang	479.735.000
20	Balai Pom di Ambon	180.145.000
21	Balai Besar Pom di Jayapura	313.015.000
22	Balai Pom di Manokwari	195.740.000
23	Balai Pom di Mamuju	13.150.000
24	Loka Pom di Kabupaten Ende	57.170.000
25	Direktorat Registrasi Obat	39.448.900.000
26	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	2.769.500.000
27	Direktorat Pengawasan distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	2.786.500.000
28	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	2.100.800.000

NO	NAMA SATUAN KERJA	NILAI
29	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	87.634.800.000
30	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	1.836.650.000
31	Direktorat Pengawasan Kosmetik	18.069.350.000
32	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	-
33	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	31.335.712.500
34	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah Dan Sedang	12.696.150.000
35	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi Dan Teknologi Baru	509.000.000
36	Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional	5.010.501.750
37	Balai Besar Pom di Banda Aceh	217.275.000
38	Balai Besar Pom di Medan	1.151.745.000
39	Balai Besar Pom di Padang	910.510.000
40	Balai Besar Pom di Pekanbaru	518.180.000
41	Balai Pom di Batam	854.940.000
42	Balai Besar Pom di Palembang	316.040.000
43	Balai Pom di Pangkal Pinang	215.750.000
44	Balai Pom di Jambi	879.105.000
45	Balai Pom di Bengkulu	483.435.000
46	Belum dikonfirmasi	-
JUMLAH		222.203.319.250

LAMPIRAN IV

PROGRES PEMILIHAN PENYEDIA SATKER
(Per 31 DESEMBER 2021)

NO	Nama Satker	Pagu Belanja Pengadaan	Realisasi Belanja Pengadaan	%
1	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya	26.150.000.000	26.150.000.000	100,00%
2	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekan Baru	17.960.000.000	17.960.000.000	100,00%
3	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang	20.660.000.000	20.660.000.000	100,00%
4	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak	17.230.000.000	17.230.000.000	100,00%
5	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya	13.970.000.000	13.970.000.000	100,00%
6	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda	29.000.000.000	29.000.000.000	100,00%
7	Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu	16.490.000.000	16.490.000.000	100,00%
8	Inspektorat Utama Badan POM	10.935.000.000	10.935.000.000	100,00%
9	Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	34.400.000.000	34.400.000.000	100,00%
10	Deputi IV Bidang Penindakan	24.760.000.000	24.760.000.000	100,00%
11	Pusat Data dan Informasi Obat Dan Makanan	34.100.000.000	34.100.000.000	100,00%
12	Loka Pom di Kabupaten Kediri	1.131.475.000	1.131.324.000	99,99%
13	Loka Pom di Kota Palopo	1.992.535.000	1.991.868.520	99,97%
14	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta	24.700.000.000	24.690.000.000	99,96%
15	Balai Pengawas Obat dan Makanan Mamuju	14.930.000.000	14.920.000.000	99,93%
16	Deputi III Bidang Pengawasan Pangan Olahan	42.580.000.000	42.480.000.000	99,77%
17	Balai Pengawas Obat dan Makanan Sofifi	9.020.000.000	8.990.000.000	99,67%
18	Loka Pom di Kota Tarakan	3.558.000.000	3.546.000.000	99,66%
19	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung	29.340.000.000	29.240.000.000	99,66%
20	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang	25.920.000.000	25.820.000.000	99,61%
21	Loka Pom di Kabupaten Ende	2.458.000.000	2.448.000.000	99,59%

NO	Nama Satker	Pagu Belanja Pengadaan	Realisasi Belanja Pengadaan	%
22	Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon	13.750.000.000	13.690.000.000	99,56%
23	Loka Pom di Kota Dumai	2.077.786.000	2.067.785.900	99,52%
24	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang	13.310.000.000	13.240.000.000	99,47%
25	Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang	18.840.000.000	18.740.000.000	99,47%
26	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta	20.080.000.000	19.970.000.000	99,45%
27	Loka Pom di Kota Surakarta	1.964.000.000	1.953.000.000	99,44%
28	Loka Pom di Kabupaten Banyumas	1.721.000.000	1.711.000.000	99,42%
29	Loka Pom di Kota Baubau	1.590.000.000	1.579.998.300	99,37%
30	Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Manokwari	17.310.000.000	17.200.000.000	99,36%
31	Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan	178.200.000.000	177.000.000.000	99,33%
32	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram	15.950.000.000	15.840.000.000	99,31%
33	Loka Pom di Kota Lubuklinggau	1.414.900.000	1.404.890.000	99,29%
34	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung	13.730.000.000	13.630.000.000	99,27%
35	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	66.500.000.000	66.000.000.000	99,25%
36	Loka Pom di Kabupaten Jember	1.313.500.000	1.303.235.500	99,22%
37	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat Dan Makanan	34.840.000.000	34.540.000.000	99,14%
38	Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari	11.330.000.000	11.230.000.000	99,12%
39	Balai Pengawas Obat Ddan Makanan Palu	17.690.000.000	17.530.000.000	99,10%
40	Loka Pom di Kota Tasikmalaya	2.005.940.000	1.985.940.000	99,00%
41	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura	20.240.000.000	20.030.000.000	98,96%
42	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh	21.830.000.000	21.600.000.000	98,95%

NO	Nama Satker	Pagu Belanja Pengadaan	Realisasi Belanja Pengadaan	%
43	Deputi I Bidang Pengawasan Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif	35.780.000.000	35.370.000.000	98,85%
44	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang	19.360.000.000	19.130.000.000	98,81%
45	Loka Pom di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	2.465.000.000	2.435.000.000	98,78%
46	Loka Pom di Kabupaten Mimika	1.561.100.000	1.541.099.000	98,72%
47	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang	23.020.000.000	22.710.000.000	98,65%
48	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan	29.700.000.000	29.300.000.000	98,65%
49	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar	27.120.000.000	26.720.000.000	98,53%
50	Loka Pom di Kabupaten Bogor	1.920.000.000	1.889.995.000	98,44%
51	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar	24.770.000.000	24.360.000.000	98,34%
52	Pusat Riset Dan Kajian Obat dan Makanan	11.800.000.000	11.600.000.000	98,31%
53	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo	13.280.000.000	13.050.000.000	98,27%
54	Loka Pom di Kabupaten Tangerang	1.714.000.000	1.684.000.000	98,25%
55	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam	17.930.000.000	17.610.000.000	98,22%
56	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado	25.770.000.000	25.070.000.000	97,28%
57	Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi	18.040.000.000	17.100.000.000	94,79%
58	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin	35.400.000.000	32.800.000.000	92,66%



BADAN POM

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN IV TAHUN 2021



Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560



021 4244691



halobpom@pom.go.id



www.pom.go.id



@bpom_ri



Bpom RI